



**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,
INDEPENDENSI AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP
MANAJEMEN LABA**

**(Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2013-2017)**

SKRIPSI

Oleh

Dewi Ayu Hartinah

NIM 150810301035

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,
INDEPENDENSI AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP
MANAJEMEN LABA**

**(Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2013-2017)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Dewi Ayu Hartinah

NIM 150810301035

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, saya selaku penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi Bapak Sueb Arifin dan (Almh) Ibu Sriwati, motivator terbesar dalam hidup saya yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada saya.
2. Saudara kandung yang saya sayangi Mbak Julistiani, Mas Ali Syaifullah, Mas Syahrul Asharik dan Mbak Meilida Putri.
3. Para teman dekat saya yang selalu memberikan semangat.
4. Para teman seperjuangan selama kuliah di Universitas Jember.
5. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Memilihlah dengan tanpa penyesalan.”

(Mary Anne Radmacher)

“Jangan membandingkan dirimu dengan siapa pun di dunia ini. Kalau kau melakukannya, sama saja dengan menghina dirimu sendiri.”

(Bill Gates)

“Satu-satunya orang yang lebih dari kamu adalah kamu sendiri.”

(Dr. Sues)

“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki segala sesuatunya untuk kita.”

(Dr. Bilal Philips)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ayu Hartinah

NIM : 150810301035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*, Independensi Auditor dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 April 2019

Yang menyatakan,

Dewi Ayu Hartinah

NIM 150810301035

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,
INDEPENDENSI AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP
MANAJEMEN LABA**

(Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
2013-2017)

Oleh

Dewi Ayu Hartinah

NIM 150810301035

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Septarina Prita DS, SE, M.SA, Ak, CA.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Wasito, M,Si, Ak, CA.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*,
Independensi Auditor dan Kualitas Audit Terhadap
Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan BUMN
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
2013-2017)
Nama Mahasiswa : Dewi Ayu Hartinah
NIM : 150810301035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 4 April 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Septarina Prita DS, SE, M.SA, Ak, CA.

NIP. 19820912 200604 2002

Drs. Wasito, M.Si, Ak, CA.

NIP. 19600103 199103 1001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak, CA.

NIP.197809272001121002

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,
INDEPENDENSI AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP
MANAJEMEN LABA (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dewi Ayu Hartinah

NIM : 150810301035

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal: 29 April 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Hj. Siti Maria W., M.Si, Ak. (.....)
NIP. 19660805 199201 2001
2. Sekertaris : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak (.....)
NIP. 19640809 199003 2001
3. Anggota : Kartika, SE, M.Sc, Ak (.....)
NIP. 19820207 200812 2002

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak
NIP. 197107271995121001

Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*, Independensi Auditor dan
Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba

(Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
2013-2017

Dewi Ayu Hartinah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh dari *good corporate governance*, independensi auditor dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Dimana, *good corporate governance* diukur dengan proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Akrua abnormal akan digunakan sebagai proksi dari manajemen laba.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian adalah 15 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih menggunakan purposive sampling selama periode penelitian, tahun 2013-2017. Data dianalisis menggunakan regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrua abnormal, sedangkan jumlah komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrua abnormal.

Kata Kunci: Akrua abnormal, *good corporate governance*.

*Analysis of Effect of Good Corporate Governance, Auditor's Independence and
Audit Quality on Earnings Management*

(Study at BUMN listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2017)

Dewi Ayu Hartinah

*Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

ABSTRACT

The aim of this research is to provide empirical evidence of the effect of good corporate governance, auditor's independence and audit quality on earnings management. Good corporate governance is measured by the proportion of independent commissioners of the board, audit committee's size, institutional ownership, and managerial ownership. Abnormal accruals is the proxy of earnings management.

This type of research use quantitative research. The research used 15 BUMN companies listed in Indonesia Stock Exchange, selected using purposive sampling method, during the research period 2013-2017. Data were analyzed using multiple regression method.

The results of this research are proportion of independent commissioners of the board, institutional ownership, managerial ownership and auditor's independence have no significant effect on earnings management that is proxied through abnormal accruals, while audit committee's size and audit quality have negative and significant effect on earnings management that is proxied through abnormal accruals.

Keywords: *Abnormal accruals, good corporate governance.*

RINGKASAN

Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*, Independensi Auditor dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017); Dewi Ayu Hartinah; 150810301035; 2019; 77 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Media komunikasi yang biasanya digunakan untuk menghubungkan kepentingan pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan adalah laporan keuangan (Oktafia, 2010). Dimana, dalam laporan keuangan, manajer selaku pengelola perusahaan melaporkan kinerjanya kepada *primcipal* selaku pemilik perusahaan. Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2017), laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi *stakeholders* dalam memberikan keputusan. Penyajian laporan keuangan perusahaan diharuskan menggunakan akrual basis yang diatur dalam PSAK Nomor 1 paragraf 27 (IAI, 2017), yaitu “entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas”.

Kualitas akrual perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu kualitas akrual *innate* dan kualitas akrual *discretionary* (Francis dalam Willian, 2015). Akrual dengan adanya *managerial discretion* memiliki dua implikasi, yaitu peningkatan kualitas informasi laba dan pemanfaatan akrual menjadi subyek manipulasi laba. Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008:47). *Earning management* dilakukan agar seolah-olah laba memiliki kualitas laba yang baik dan stabil, dengan harapan terlihatnya laba yang baik tersebut mendapatkan respon positif dari pasar dan *stakeholders* (Kusindratno dan Sumarta, 2005). Dengan menggunakan celah yang ada

dalam metode akrual, manajemen akan melakukan manajemen laba. Manajemen laba dilakukan untuk mengelabui *principal*, dimana manajemen laba merupakan salah satu implikasi dari adanya konflik kepentingan antara manajer dengan *principal*.

Corporate governance adalah konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Herawaty, 2008). Menurut OECD, tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor.

OECD menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan memiliki 4 hal, yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Selain itu, untuk meminimalisir motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba, hal lain yang perlu diperhatikan adalah independensi auditor dan kualitas audit.

Komisaris independen adalah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan perusahaan, baik dengan dewan komisaris lainnya, dewan direksi, pemilik saham perusahaan, *stakeholder*, dan bukan merupakan anggota penting dalam Bursa Efek Indonesia (Peraturan Bapepam No. IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit). Dimana, tugas dari komisaris independen adalah mengawasi dewan direksi dan memberikan masukan kepada dewan direksi.

Komite audit adalah pihak dalam perusahaan yang terdiri dari pihak independen yang diketuai oleh komisaris independen dan memiliki minimal 2 anggota independen (Peraturan Bapepam No IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit). Dimana, tugas dari komite audit adalah mengawasi manajemen terkait dengan pelaksanaan prosedur akuntansi dan memastikan bahwa manajemen telah

melaksanakan prosedur akuntansi sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku.

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan prosentase (Nabela, 2012). Dimana, kepemilikan institusional biasanya dimiliki oleh Negara, bank, reksadana, dana pensiun, dan institusi lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Kepemilikan institusional adalah perbandingan antara saham yang dimiliki oleh institusi dengan saham yang beredar.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham (Imanta dan Satwiko, 2011). Dimana, dengan adanya kepemilikan manajerial akan meminimalisir manajemen dalam melakukan manajemen laba karena manajer juga merupakan pemegang saham.

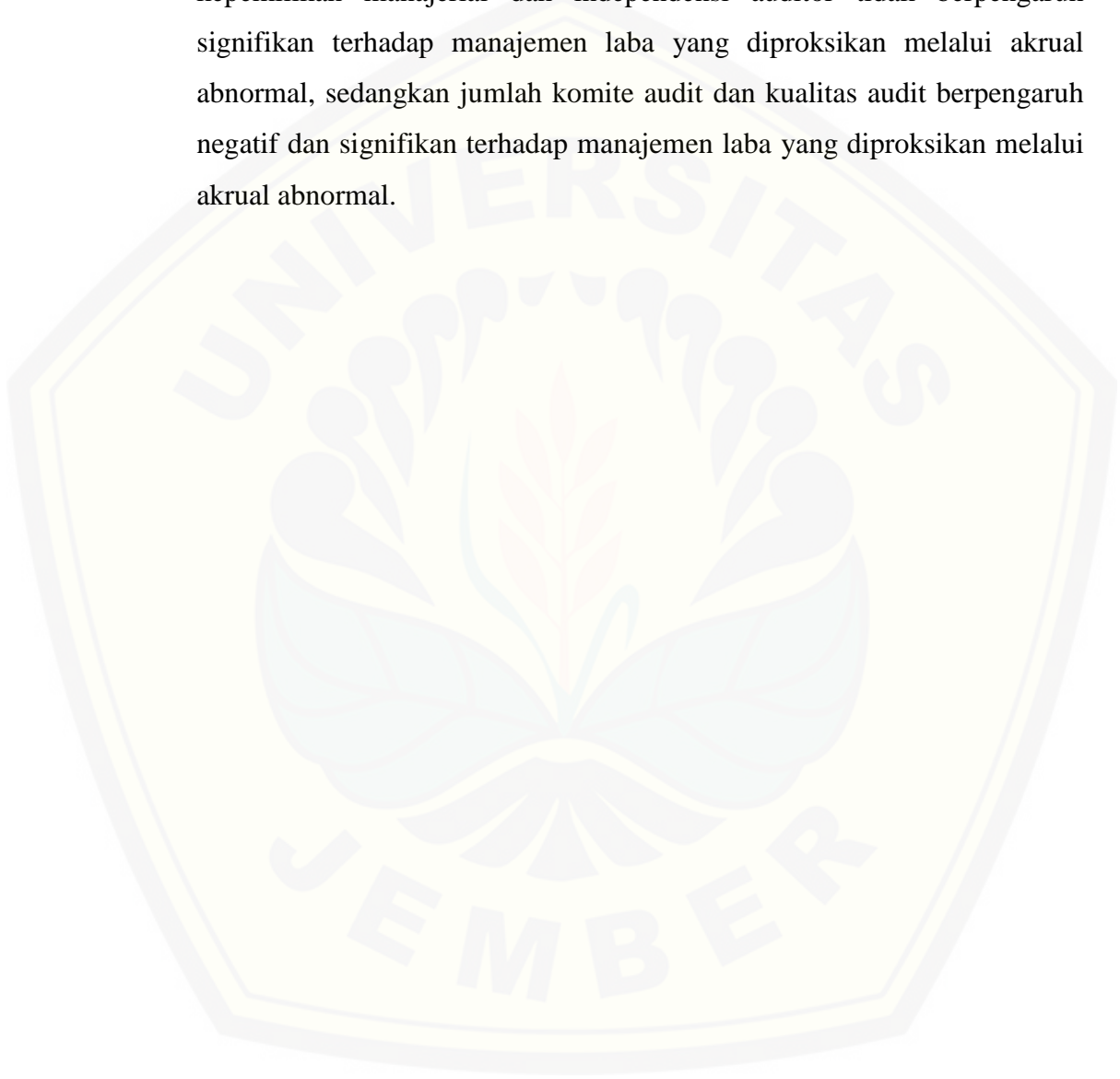
Independensi menurut Mulyadi (2010) dalam Tjun, dkk (2012) merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang lain. Independensi auditor merupakan sebuah sikap objektif dan sudut pandang yang tidak bias oleh auditor. Dimana, auditor harus menjaga independensinya agar dapat melaksanakan prosedur audit yang baik sehingga audit yang dihasilkan memiliki kualitas audit yang baik.

Kualitas audit menurut de Angelo (1981) dalam Mahdi (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kepatuhan terhadap standar dan berlaku sesuai dengan kode etiknya, menggunakan kompetensi yang dimiliki, bersikap independen, dan memahami bisnis klien.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Objek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling. Data yang dikumpulkan menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan 15 perusahaan BUMN sampel tahun 2013-2017

yang didapat melalui website resmi perusahaan tersebut dan website resmi Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal, sedangkan jumlah komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal.



SUMMARY

Effect Analysis of Good Corporate Governance, Auditor's Independence and Audit Quality on Earnings Management (Study at BUMN listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2017); Dewi Ayu Hartinah; 150810301035; 2019; 77 pages; Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember.

Communication media that are used for the interests of internal companies and external parties are financial statements (Oktafia, 2010). Where, in financial statements, managers as company managers report to Principal as the owner of the company. According to PSAK No. 1 (IAI, 2017), financial statements have the purpose of providing information about financial position, company performance, and entity cash flows that are beneficial to stakeholders in providing results. The presentation of the company's financial statements is required to use an accrual basis set forth in PSAK Number 1 paragraph 27 (IAI, 2017), namely "the entity that prepares financial statements on an accrual basis, except for cash flow statements".

Corporate accrual quality is divided into two, namely default accrual quality and discretionary accrual quality (Francis in Willian, 2015). Accrual with managerial wisdom has two implications, namely the increase in the quality of earnings information and the use of accruals are subject to earnings manipulation. Earnings management is an effort made by the management of the company to intervene or improve the information contained in financial statements with the aim of tricking stakeholders who want to know the performance and requirements of the company (Sulistyanto, 2008: 47). Earnings management is conducted by profit and has good and stable earnings quality, with the expectation of earnings to look good which gets a positive response from the market and stakeholders (Kusindratno and Sumarta, 2005). By using existing gaps in the accrual method, management will perform earnings management. Earnings management is done to

deceive the principal, while management profit is one of the implications of differences in interests between managers with the principal.

Corporate governance is a concept based on agency theory, which is expected to function as a tool to provide confidence and trust to investors that they will receive returns on the funds they have invested (Herawaty, 2008). According to the OECD, the purpose of corporate governance is to reduce the gap between parties who have interests in the company and increase investor confidence.

The OECD explained that the mechanism of good corporate governance is to have 4 things, namely independent commissioners, audit committees, managerial ownership, and institutional ownership. In addition, to minimize management motivation in conducting earnings management, another thing that needs to be considered is auditor independence and audit quality.

The independent commissioner is a board of commissioners from outside the company and is not affiliated with the company, either with other board of commissioners, board of directors, company shareholders, stakeholders, and is not an important member of the Indonesia Stock Exchange (Bapepam Regulation No. IX.I.5 About the Establishment and Audit Committee Work Guidelines). Where, the task of independent commissioners is to oversee the board of directors and provide input to the board of directors.

The audit committee is a party in a company consisting of independent parties chaired by independent commissioners and has at least 2 independent members (Bapepam Regulation No. IX.I.5 concerning Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee). Where, the task of the audit committee is to oversee management related to the implementation of accounting procedures and ensure that management has carried out accounting procedures in accordance with applicable accounting standards and principles.

Institutional ownership is the proportion of shares held by an institution at the end of the year as measured by the percentage (Nabela, 2012). Where, institutional ownership is usually owned by the State, banks, mutual funds, pension funds, and other institutions both domestically and abroad. Institutional ownership is a comparison between shares held by an institution and outstanding shares.

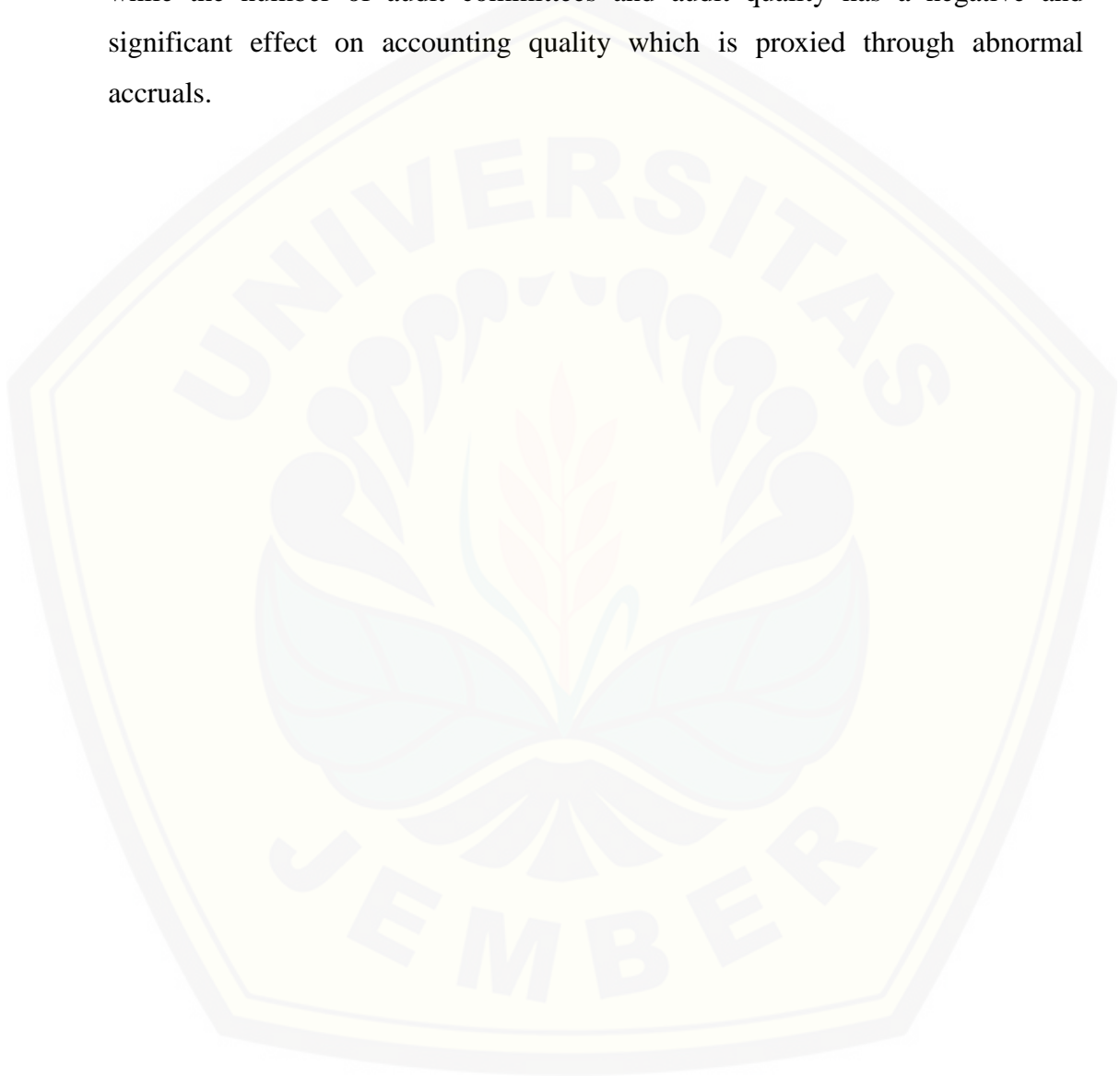
Managerial ownership is the ownership of the company by the manager or in other words the manager is also a shareholder (Imanta and Satwiko, 2011). Where, with managerial ownership, management will minimize management of earnings because managers are also shareholders.

Independence according to Mulyadi (2010) in Tjun, et al (2012) is a mental attitude that is free of influence, not controlled by others, not dependent on others. Auditor independence is an objective attitude and point of view that is not biased by the auditor. Where, the auditor must maintain its independence in order to carry out good audit procedures so that the resulting audit has good audit quality.

Audit quality according to de Angelo (1981) in Mahdi (2014) defines audit quality as a probability, where an auditor finds and reports about a violation in his client's accounting system. Audit quality is influenced by several things, such as compliance with standards and applies in accordance with the code of ethics, using competencies that are owned, independent, and understanding the client's business.

This type of research uses quantitative research. The research object was selected using purposive sampling. Data collected using secondary data from annual reports and audited financial statements of 15 sample BUMN companies from 2013-2017 obtained through the company's official website and the official website of the Indonesia Stock Exchange. This study uses multiple linear regression.

The results of this study indicate that the proportion of independent commissioners in the board of commissioners, audit committee's size, institutional ownership, managerial ownership and auditor independence have no significant effect on accounting quality that is proxied through abnormal accruals, while the number of audit committees and audit quality has a negative and significant effect on accounting quality which is proxied through abnormal accruals.



PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*, Independensi Auditor dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)”.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari banyak pihak. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta Sueb Arifin dan Ibu yang kusayangi (Almh) Sriwati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya, serta perhatian dalam bentuk moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Karunia, Kesehatan dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terimakasih penulis berikan pula kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE. MM. Ak. CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini.
2. Dr. Yosefa Sayekti, SE. M.Com. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Septarina Prita DS, SE, M.SA, Ak, CA., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

6. Seluruh Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Saudara kandung yang saya sayangi Mbak Julistiani, Mas Ali Syaifullah, Mas Syahrul Asharik dan Mbak Meilida Putri.
8. Para “Teman Dekat” saya yang selalu memberikan semangat.
9. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu ada saat susah maupun senang.
10. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
11. Teman-teman KKN 228 Sumber Jeruk Bondowoso.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Jember, 4 April 2019

Penulis

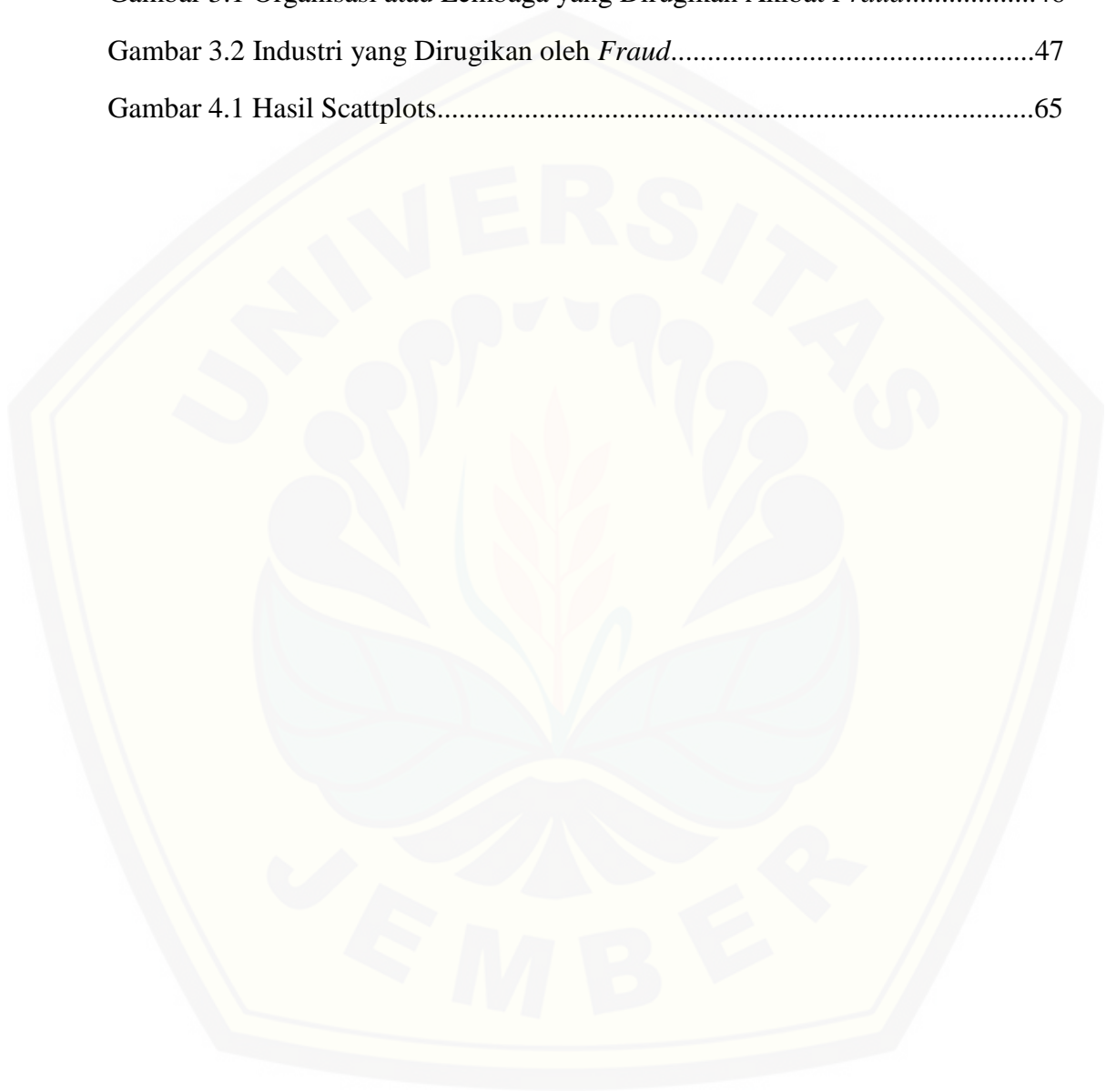
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xv
PRAKATA	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1Teori Keagenan.....	8
2.1.2Manajemen Laba.....	11
2.1.3Tata Kelola Perusahaan.....	15
2.1.3.1 Proporsi Komisaris Independen.....	20
2.1.3.2 Jumlah Komite Audit.....	21

2.1.3.3 Kepemilikan Institusional.....	24
2.1.3.4 Kepemilikan Manajerial.....	25
2.1.4 Independensi Auditor.....	26
2.1.5 Kualitas Audit.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian.....	34
2.4 Perumusan Hipotesis.....	37
2.4.1 Proporsi Komisaris Independen.....	37
2.4.2 Jumlah Komite Audit.....	38
2.4.3 Kepemilikan Institusional.....	39
2.4.4 Kepemilikan Manajerial.....	40
2.4.5 Independensi Auditor.....	41
2.4.6 Kualitas Audit.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	44
3.2 Populasi dan Sampel.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya.....	48
3.4.1 Variabel Independen.....	48
3.4.2 Variabel Dependen.....	54
3.5 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	62
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis.....	65
4.4 Hasil Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	36
Gambar 3.1 Organisasi atau Lembaga yang Dirugikan Akibat <i>Fraud</i>	46
Gambar 3.2 Industri yang Dirugikan oleh <i>Fraud</i>	47
Gambar 4.1 Hasil Scattplots.....	65

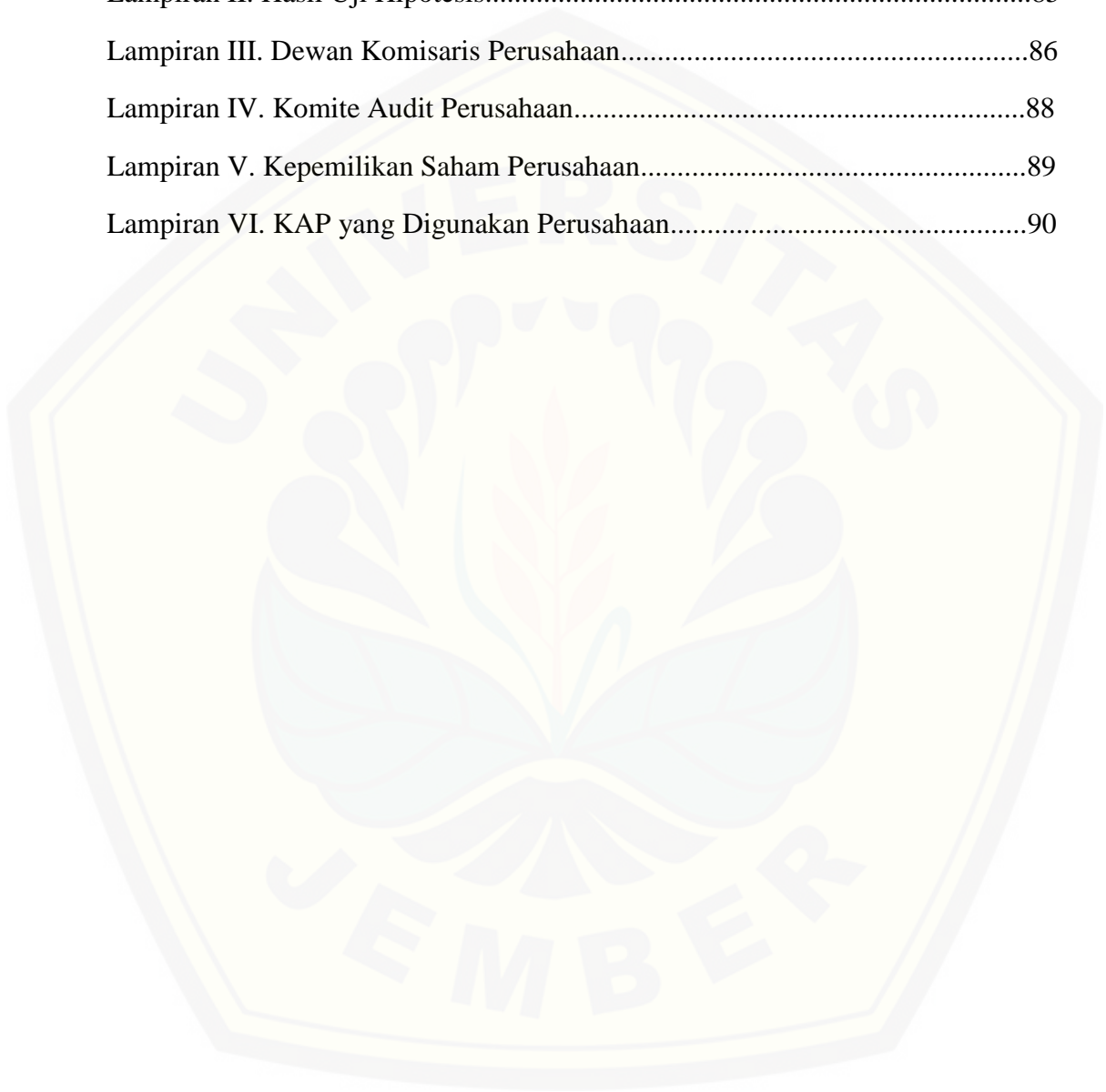


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Table 3.1 Tahapan Seleksi Sampel Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Sampel Penelitian.....	47
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Independen.....	51
Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel Dependen.....	56
Tabel 4.1 Tahapan Seleksi Sampel Penelitian.....	61
Tabel 4.2 Daftar Nama Perusahaan.....	62
Tabel 4.3 Hasil Uji Komogorov-Smirnov (K-S)	63
Tabel 4.4 Hasil Uji Durbin Watson.....	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik t.....	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Kelayakan Model.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	83
Lampiran II. Hasil Uji Hipotesis.....	85
Lampiran III. Dewan Komisaris Perusahaan.....	86
Lampiran IV. Komite Audit Perusahaan.....	88
Lampiran V. Kepemilikan Saham Perusahaan.....	89
Lampiran VI. KAP yang Digunakan Perusahaan.....	90



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media komunikasi yang biasanya digunakan untuk menghubungkan kepentingan pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan adalah laporan keuangan (Oktafia, 2010). Dimana, dalam laporan keuangan, manajer selaku pengelola perusahaan melaporkan kinerjanya kepada *principal* selaku pemilik perusahaan. Laporan keuangan dalam PSAK Nomor 1 (IAI, 2017), dijelaskan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2017), laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi *stakeholders* dalam memberikan keputusan.

Penyajian laporan keuangan perusahaan diharuskan menggunakan akrual basis yang diatur dalam PSAK Nomor 1 paragraf 27 (IAI, 2017), yaitu “entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas”. Dimana berdasarkan PSAK Nomor 1 (IAI, 2017), prinsip akrual melibatkan estimasi, pemilihan kebijakan akuntansi, alokasi, serta keputusan yang melibatkan manajemen yang bersifat subjektif.

Verdi dalam William (2015) menyatakan bahwa kualitas akuntansi dapat dilihat dari kualitas akrual perusahaan. Kualitas akuntansi perusahaan dapat meningkatkan efisiensi investasi perusahaan melalui upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Laporan keuangan yang berkualitas dapat mengurangi asimetri informasi antara manajer selaku *agent* dengan *principal*, mengurangi terjadinya agensi konflik, biaya pengawasan yang lebih rendah dan meningkatkan pemilihan proyek.

Francis dalam William (2015) menyatakan bahwa komponen kualitas akrual perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kualitas akrual *innate* dan kualitas akrual *discretionary*. Dimana, *innate accruals quality* merupakan akrual yang dipengaruhi dan diakibatkan kondisi ekonomi perekonomian, operasional perusahaan, dan merefleksikan fundamental ekonomi. sedangkan

discretionary accruals quality adalah akrual yang merupakan subjek kewenangan atau keleluasaan dari pilihan manajemen (*managerial discretion*) dan merefleksikan dasar dari kebijakan akuntansi dalam praktik akuntansi perusahaan.

Menurut Guay yang dikutip oleh William (2015), akrual dengan adanya *managerial discretion* memiliki dua implikasi. Implikasi pertama adalah dengan keleluasaan yang dimiliki oleh manajer, manajemen bisa meningkatkan kualitas informasi dari laba sehingga laba dapat merefleksikan kinerja perusahaan yang dapat diandalkan dan memiliki ketepatan waktu. Implikasi kedua adalah dengan keleluasaan yang dimiliki manajer, manajemen akan memiliki motivasi untuk memanfaatkan akrual sehingga sangat mungkin untuk menjadi subjek manipulasi manajer dan merupakan ukuran valid dari manajemen laba.

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008:47). *Earning management* dilakukan agar seolah-olah laba memiliki kualitas laba yang baik dan stabil, dengan harapan terlihatnya laba yang baik tersebut mendapatkan respon positif dari pasar dan *stakeholders* (Kusindratno dan Sumarta, 2005). Dengan menggunakan celah yang ada dalam metode akrual, manajemen akan melakukan manajemen laba. Manajemen laba dilakukan untuk mengelabui *principal*, dimana manajemen laba merupakan salah satu implikasi dari adanya konflik kepentingan antara manajer dengan *principal*. Dimana, menurut teori agensi, konflik kepentingan ini dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan sendiri yang dilakukan oleh *principal* melalui *good corporate governance*.

Corporate governance adalah konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Herawaty, 2008).

Menurut OECD, tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Bradburyy, Mak, dan Tan (2004), dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan (diukur melalui karakteristik direktur independen dan komite audit dengan kualitas akuntansi (diukur dengan akrual abnormal). Dimana menurutnya, karakteristik direktur independen dan komite audit independen memiliki keterkaitan dengan tingkat kualitas akuntansi suatu perusahaan. Komite audit efektif mengurangi tingkat akrual abnormal dalam proses pelaporan keuangan. Hasil ini ditunjukkan apabila komite audit juga didukung dengan adanya direktur independen dalam perusahaan tersebut. Menurutnya, tingkat akrual abnormal yang tinggi dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara akrual abnormal dan direktur independen. Namun, jumlah dewan direksi dan komite audit independen terkait dengan kualitas akuntansi (artinya adanya penurunan akrual abnormal).

Penelitian lain dilakukan oleh Pujiati dan Arfan (2013) yang meneliti tentang struktur kepemilikan dan kompensasi bonus serta pengaruhnya terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Dimana, hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian lainnya dilakukan oleh Prabowo (2014) menyatakan bahwa ukuran dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan komisaris independen dan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian oleh Pratiwi (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan dengan manajemen laba, dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba, dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan dengan

manajemen laba. Penelitian berikutnya adalah penelitian oleh Qulub (2017) yang meneliti tentang pengaruh kualitas audit, independensi auditor, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas audit dan independensi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian berikutnya oleh Rahayu (2018) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan *free cash flow* dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Menurut Pratiwi (2016), terdapat empat mekanisme *good corporate governance*, yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Namun, sekaligus berpedoman pada penelitian yang dilakukan Bradburry, dkk (2004), mekanisme tata kelola perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Selain itu, penelitian ini juga akan berpedoman pada penelitian Rahayu (2018) dengan menambahkan independensi auditor dan kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bradburry, dkk (2004), Prabowo (2014), Pratiwi (2016), dan Rahayu (2018) ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian atas beberapa variabel terkait pengaruhnya terhadap akrual abnormal (manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal) sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap akrual abnormal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah mekanisme *good corporate governance* (proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial), independensi auditor dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan (yang diukur dengan akrual abnormal) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana apabila tingkat

akrual abnormal perusahaan tinggi, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa manajemen laba perusahaan tinggi. Objek dalam penelitian ini adalah BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, dimana semua perusahaan keuangan (termasuk bank) akan dikecualikan. Alasan pemilihan BUMN karena menurut laporan survai ACFE Indonesia 2016, BUMN merupakan jenis organisasi kedua yang paling dirugikan akibat *fraud*, dan terdaftar di BEI agar mudah dalam mendapatkan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan. Selain itu, alasan perusahaan keuangan, termasuk bank, dikecualikan adalah karena sektor ini cenderung memiliki arus kas dan penerapan akrual yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan sektor perusahaan lainnya. Pemilihan tahun 2013 sampai dengan 2017 karena pada tahun tersebut terdapat perusahaan BUMN yang terkena kasus penyajian laba yang tidak sebenarnya atau kasus manajemen laba. Salah satunya adalah kasus manajemen laba oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang terjadi pada tahun 2015, dimana jajaran direksi memberikan perintah kepada kepala unit dan kepala akuntansi untuk memundurkan semua pembayaran hutang agar laporan keuangan menyajikan laba yang terlihat baik (Energi World Indonesia, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal?
2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal?

5. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal?
6. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah mekanisme *good corporate governance* (proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris) berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal.
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme *good corporate governance* (jumlah komite audit) berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal.
3. Untuk mengetahui apakah mekanisme *good corporate governance* (kepemilikan institusional) berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal.
4. Untuk mengetahui apakah mekanisme *good corporate governance* (kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal.
5. Untuk mengetahui apakah independensi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal.
6. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi *Stakeholders*

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi *stakeholders* maupun calon *stakeholders*, sebagai referensi untuk menilai manajemen laba perusahaan (yang diukur melalui akrual abnormal) melalui mekanisme *good corporate governance* (proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial), independensi auditor dan kualitas audit.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan dalam menganalisa pengaruh mekanisme *good corporate governance* (proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial), independensi auditor dan kualitas audit terhadap manajemen laba (yang diukur dengan akrual abnormal).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai penambah wawasan terkait analisa pengaruh mekanisme *good corporate governance* (proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial), independensi auditor dan kualitas audit terhadap manajemen laba (yang diukur dengan akrual abnormal), dan dapat dipergunakan untuk keperluan studi dan penelitian selanjutnya mengenai topik permasalahan yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal* adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan yang menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan *agent* adalah pengelola perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan oleh para pemegang saham kepadanya.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Dimana teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Menurut Adrian (2011), para tenaga kerja professional bertugas untuk menjalankan manajemen perusahaan, semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh agen. Sementara pemilik perusahaan atau pemegang saham hanya bertugas untuk mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Berdasarkan kajian dari teori keagenan, terdapat pemisahan yang jelas antara principal dan agen yang memiliki perbedaan kepentingan dalam menjalankan perusahaan yang disebut dengan *agency conflict*. Terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang mereka kehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2009).

Eisenhardt (1989) yang dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), menggunakan tiga asumsi dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi, yaitu :

- i. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau disebut dengan *self interest*,
- ii. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau disebut dengan *bounded rationality*,
- iii. Manusia selalu menghindari risiko atau disebut dengan *risk averse*.

Manusia pada umumnya memiliki hasrat untuk mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Dalam hal ini, seorang manajer akan dituntut untuk membuat perusahaan mendapatkan laba yang tinggi. Namun, disamping itu manajer juga ingin dibayar dengan tinggi tanpa harus bekerja terlalu keras. Hal ini akan menyebabkan terjadinya dua kepentingan, dimana kepentingan pertama adalah kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan, dan kepentingan kedua adalah kepentingan untuk mensejahterakan manajer dengan memberi imbalan yang menyebabkan keuntungan perusahaan berkurang. Alasan-alasan ini lah yang akhirnya menjadi penyebab adanya *agency conflict*.

Agency conflict dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dengan menghindari penilaian negatif investor yang

disebabkan oleh buruknya kinerja perusahaan. Menurut Sartono (2010) dalam Lusiana (2014), usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan konflik keagenan adalah sebagai berikut :

- i. Pemberian kompensasi yang cukup berupa kompensasi minimum, kompensasi tambahan dan pemberian *stock option*, yaitu hak untuk membeli saham perusahaan dimasa datang dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan dimuka. Pemberian *stock option* diharapkan dapat menurunkan konflik keagenan, karena semakin baik kinerja perusahaan maka harga saham perusahaan akan semakin tinggi.
- ii. Intervensi langsung oleh pemegang saham.
- iii. Ancaman untuk dipecat atau *threat of firing*.
- iv. Ancaman untuk diambil alih atau *theat of takeovers*.

Berdasarkan teori agensi, *principal* akan memberikan kewenangan kepada *agent* dalam menjalankan perusahaannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban wewenang yang telah diberikan, manajer harus melaporkan kinerja perusahaan secara jujur dan transparan. Namun pada kenyataannya manajer mengelabui *principal* dan tidak melaporkan kinerja perusahaan secara jujur dan transparan. Salah satu tindakan itu adalah melakukan manajemen laba. Scott (2009:287) mengkonfirmasi pernyataan dari Watts dan Zimmerman bahwa ada beberapa motivasi *earnings management* yaitu *bonus plan hyphotesis*, *debt to equity hyphotesis*, dan *political cost hyphotesis*. Manajemen laba biasanya dilakukan dengan mencari celah dalam basis akrual. Dimana, akrual abnormal merupakan pilihan dari manajer dalam menggunakan celah dari metode akrual untuk melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Akrual abnormal terjadi karena manajemen diberikan keleluasaan dalam menjalankan perusahaan dan memilih metode akuntansi yang akan digunakan dalam mencatat dan menginformasikan kinerja perusahaan yang berupa laporan keuangan kepada pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.2 Manajemen Laba

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan akan menimbulkan asimetri informasi sehingga agen sebagai pengelola perusahaan memiliki tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melakukan pengaturan laba agar terlihat baik dan rata yang disebut dengan manajemen laba.

Menurut Scot (2006) dalam Rahayu (2018), manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan akrual dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan pengertian ini, salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang akan menguntungkan dan membuat laba terlihat rata dan stabil.

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008:47). Tindakan manajemen laba dilakukan oleh pihak manajemen untuk membohongi para investor dan *stakeholders* dengan memperlihatkan seolah-olah laba perusahaan terlihat rata dan stabil sehingga kinerja perusahaan terlihat baik ataupun membaik.

Menurut Healy (1998) dalam Wariantio (2013), manajemen suatu perusahaan dapat melakukan manajemen laba dengan dua cara, yaitu :

- i. Mengendalikan transaksi-transaksi akrual, transaksi yang tidak berpengaruh terhadap aliran kas masuk maupun kas keluar,

- ii. Mengubah kebijakan akuntansi, dan manajemen harus menjelaskannya dalam *disclosure* pada laporan keuangan tahunan.

Dalam penelitian ini, manajemen laba dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dengan mengendalikan akun akrual. Dimana, menurut Hidayati dan Zulaikha (2004) dalam Arunjati (2011), konsep akrual ini memungkinkan dilakukannya rekayasa laba atau *earning management* oleh manajer untuk menaikkan atau menurunkan angka akrual dalam laporan laba rugi. Menurut Fisher dan Rozenzweig (2009) dalam Arunjati (2011), perekayasaan laba juga dapat dilakukan dengan mendistorsi laba dengan cara menggeser periode pengakuan biaya dan pendapatan.

Menurut Putri (2018) akuntansi akrual dapat memberikan relevansi informasi yang lebih superior dibandingkan dengan *cash flow*. Dimana, superioritas ini dijelaskan melalui beberapa hal, yaitu :

- i. Kinerja keuangan, dimana dalam metode akrual memastikan bahwa pendapatan dan beban yang berhubungan dengan pendapatan diterima tercatat dalam satu periode,
- ii. Kondisi keuangan, dimana metode akrual menghasilkan neraca yang lebih akurat yang menggambarkan tingkat sumber daya yang ada bagi perusahaan untuk menghasilkan *future cash flow*,
- iii. Memprediksi *future cash flow*, dimana apa yang terjadi saat ini dapat meramalkan kas yang akan diterima di masa mendatang dan akrual lebih baik dalam menghubungkan pemasukan dan pengeluaran yang lebih akurat.

Menurut Satwika dan Damayanti (2005) konsep akrual dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Akrual normal (*non discretionary accruals*)

Akrual normal adalah akrual wajar dan tunduk pada prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU), apabila dilanggar dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan menjadi tidak wajar (Satwika dan Damayanti, 2005). Contohnya adalah ketika ada sebuah

mesin, manajer dapat memilih dalam menggunakan metode depresiasi dan umur ekonomis mesin tersebut. Dimana, perbedaan metode dan estimasi tersebut akan menghasilkan laba yang berbeda pada akhir periode.

b. Akruai abnormal (*discretionary accruals*)

Akruai abnormal adalah pengakuan akruai laba atau beban yang bebas serta tidak diatur dan merupakan kebijakan manajemen (Satwika dan Damayanti, 2005). Akruai abnormal dapat juga diartikan sebagai akruai yang tidak tunduk pada prinsip akuntansi dan merupakan pilihan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi dan estimasi yang dapat menguntungkan perusahaan. Contoh dari akruai abnormal adalah pemilihan kebijakan akuntansi yang akan menguntungkan manajemen, pergantian kebijakan pengakuan persediaan, pengukuran penghapusan piutang, masa manfaat dan depresiasi peralatan.

Berdasarkan pengertian diatas, dijelaskan bahwa perbedaan akruai normal dan akruai abnormal adalah kepatuhan terhadap prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. PABU adalah suatu rerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi (yuridis), teoritis, dan praktis.¹ *Accounting Principle Board (APB)* menyatakan, “*generally accepted accounting principles encompass the convention, rules, and procedures necessary to define accounting practice at a particular time. The standard of “generally accepted accounting principles” include not only board guidelines of general application, but also detailed practices and procedures.*”²

¹ Suwardjono, Teori Akuntansi : Perekayasaan Laporan Keuangan, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta. 2014, halaman 122.

² Suwardjono (2004), *ibid*, halaman 122.

Apabila diterjemahkan secara bebas adalah “prinsip akuntansi yang diterima secara umum mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk mendefinisikan praktik akuntansi pada waktu tertentu. Standar dari prinsip akuntansi berterima umum tidak hanya termasuk dalam pedoman dewan dalam aplikasi umum, namun juga praktik dan prosedur terperinci.

Scott, Hanlon, dan Maydew (2012) menyatakan bahwa terdapat empat komponen akrual yang bersifat *discretionary accruals* yang digunakan untuk meningkatkan laba jangka pendek yang dilaporkan, antara lain:

- i. Biaya depresiasi atau amortisasi, dimana manajer dapat mengendalikan penentuan akrual yang diskresioner terhadap masa manfaat dari aset tetap,
- ii. Kenaikan piutang bersih atau *net account receivable* dengan adanya penurunan penyisihan atau cadangan piutang tak tertagih, dimana manajer dapat menentukan besarnya cadangan kerugian piutang yang tak dapat ditagih,
- iii. Kenaikan persediaan dengan memasukkan biaya overhead tetap ke dalam persediaan daripada mengakui biaya tersebut sebagai beban,
- iv. Penurunan pada *account payable* dan *accrual liabilities*, dimana manajer dapat membebankan biaya klaim atas garansi pada periode berikutnya, sehingga beban garansi pada periode saat ini menjadi kecil dan mendapatkan laba lebih besar.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dijelaskan bahwa akrual abnormal merupakan salah satu cara untuk melakukan manajemen laba. Dimana, menurut ACFE dalam Tuanakotta (2010:203) manajemen laba merupakan *fraud* dalam penyusunan laporan keuangan. *Fraud* ini berupa salah saji dalam laporan keuangan atau *misstatement*, baik itu *overstatement* maupun *understatement*. Manajemen laba tidak selalu tentang menaikkan laba, namun menampilkan laba agar terlihat stabil dan cenderung rata. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat dilakukan

dengan menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/revenue overstatement*) dan menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatement*).

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan

Menurut Nuryaman (2008) tata kelola perusahaan adalah salah satu elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. Berdasarkan pengertian ini, tata kelola perusahaan merupakan sebuah unsur yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segi ekonomi, yang akan saling menghubungkan antara pihak manajemen, komisaris, dan *stakeholders* baik pemegang saham, kreditur, dan lainnya.

Tata kelola perusahaan merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Herawaty, 2008). Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan akan menumbuhkan rasa saling percaya antara pemegang saham dan manajemen perusahaan.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 1999 mendefinisikan, “*corporate governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholder and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions and corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are sets and the mean of attaining those objectives and monitoring performance*”. Apabila diterjemahkan secara bebas, tata kelola perusahaan adalah sistem dimana korporasi bisnis diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan menentukan distribusi hak

dan kewajiban diantara para pelaku dalam perusahaan, seperti dewan, manajer, pemegang saham dan pemegang kepentingan lainnya, dan merinci aturan dan prosedur dalam membuat keputusan dan urusan perusahaan lainnya. Dengan melakukan ini, perusahaan juga menyediakan struktur sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja dari perusahaan itu sendiri. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Tata kelola perusahaan mengatur pembagian hak dan kewajiban pelaku dalam organisasi perusahaan, termasuk dewan, manajer, pemegang saham dan anggota pemangku kepentingan lainnya. Pembagian hak dan kewajiban ini digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi kinerja dewan dan manajer perusahaan guna mencapai keberhasilan jangka panjang bagi perusahaan.

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu proses atau struktur yang digunakan oleh suatu organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.³ Suatu perusahaan memerlukan tata kelola yang baik yang digunakan untuk mengelola perusahaan dalam rangka meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai dari pemegang saham tanpa mengesampingkan kepentingan dari *stakeholder* lainnya.

ICAEW selaku institut akuntan berizin resmi di Inggris dan Wales mendefinisikan, “*corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. The purpose of corporate governance is to facilities effective, entrepreneurial and prudent management that can deliver the long-term success of the company*”. Apabila diterjemahkan secara bebas, tata kelola perusahaan merupakan sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah

³ Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002

untuk memfasilitasi manajemen yang efektif, ulet dan bijaksana, yang dapat memberikan keberhasilan jangka panjang bagi perusahaan. Berdasarkan terjemahan diatas, tata kelola perusahaan merupakan sebuah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan secara efektif, ulet dan bijaksana, dimana apabila tata kelola perusahaan dilakukan dengan baik, perusahaan akan memperoleh kesuksesan jangka panjang.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:101) tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dimana, dijelaskan pula bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas terkait tata kelola perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *good corporate governance* adalah sebuah sistem atau struktur yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab dan efektif untuk meningkatkan nilai tambah bagi para *stakeholders*. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sebuah elemen kunci yang perlu dijalankan untuk mendapatkan kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan.

Terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik, terdapat Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG). Dalam peraturan tersebut, dijabarkan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan demi terciptanya GCG, dimana prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Transparansi, terbagi menjadi dua, yaitu keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan informasi lain yang relevan dengan perusahaan,
- b. Kemandirian, merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola dengan profesional tanpa terjadinya benturan kepentingan antar

pihak dalam perusahaan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip korporasi yang ada.

- c. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif,
- d. Pertanggungjawaban, merupakan kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang berlaku,
- e. Kewajaran, merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Sutedi (2011), adalah sebagai berikut :

- a. *Transparancy* atau prinsip keterbukaan, dimana perusahaan harus menyediakan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*, dimana informasi ini diperlukan untuk membuat keputusan.
- b. *Accountability* atau prinsip dapat dipertanggungjawabkan, dimana perusahaan harus dikelola dengan fungsi, struktur dan pertanggungjawaban organ perusahaan, dimana terjadi pembagian kekuasaan antara manajer sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan.
- c. *Fairness* atau prinsip kesetaraan, dimana perlu adanya perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak-hak dari *stakeholders*.
- d. *Sustainability* atau prinsip kelangsungan, dimana manajer harus menjaga kelangsungan usahanya agar dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan atau laba dan mensejahterakan para *stakeholders*.

Menurut OECD, mekanisme *good corporate governance* terdiri dari 4 hal, yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

1. Komisaris independen, dimana menurut dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan perusahaan, baik dengan dewan komisaris lainnya, dewan direksi, pemilik saham perusahaan, *stakeholder*, dan bukan merupakan anggota penting dalam Bursa Efek Indonesia (Peraturan Bapepam No. IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit). Dimana, tugas dari komisaris independen adalah mengawasi dewan direksi dan memberikan masukan kepada dewan direksi.
2. Komite audit merupakan pihak dalam perusahaan yang terdiri dari pihak independen yang diketuai oleh komisaris independen dan memiliki minimal 2 anggota independen (Peraturan Bapepam No IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit). Dimana, tugas dari komite audit adalah mengawasi manajemen terkait dengan pelaksanaan prosedur akuntansi dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan prosedur akuntansi sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku.
3. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan prosentase (Nabela, 2012). Dimana, kepemilikan institusional biasanya dimiliki oleh Negara, bank, reksadana, dana pensiun, dan institusi lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham (Imanta dan Satwiko,

2011). Dimana, dengan adanya kepemilikan manajerial akan meminimalisir manajemen dalam melakukan manajemen laba karena manajer juga merupakan pemegang saham.

Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* akan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut :

2.1.3.1 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris independen lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Dimana, secara umum dewan komisaris independen diberi tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pengawasan terhadap pihak manajemen selaku pengelola perusahaan (Indah, 2018). Komisaris independen melakukan pengawasan kualitas informasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan.

Menurut *National Code for Good Corporate Governance* (dalam Rahayu, 2018), fungsi dari komisaris independen adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan perusahaan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan sehingga manajemen akan memberikan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak merugikan para *stakeholders*.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik,
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik,
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik,
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, persyaratan pengangkatan Komisaris Independen adalah sebagai berikut :

1. Bukan karyawan atau memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan emiten minimal 6 bulan,
2. Tidak memiliki saham pada emiten baik secara langsung maupun tidak langsung,
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten, Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Emiten,
4. Tidak melakukan hubungan bisnis dengan Emiten baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.3.2 Jumlah Komite Audit

Penerapan *good corporate governance* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi adalah adanya komite audit. Menurut Toha (2004) dalam Chrisdianto (2013) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan

komisaris tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat guna melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi komisaris dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Berdasarkan pengertian tersebut, komite audit merupakan pihak yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan agar perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Menurut Effendy (2005) dalam Chrisdianto (2013), salah satu tugas komite audit adalah menjembatani pemegang saham atau *stakeholders* dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Hal ini akan menuntut komite audit untuk independen, dalam arti tidak memihak dan menguntungkan pihak tertentu, dan mengedepankan kepentingan perusahaan.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia, dalam webnya, adanya komite audit dalam perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *check and balances*, yang nantinya dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada *stakeholders*. Dimana, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan kepada perusahaan. Hal ini mencakup *review* terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas lainnya dari komite audit adalah penelaahan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan aturan yang berlaku.

Menurut peraturan BEI (d/h BEJ) No. I.A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas, persyaratan pencatatan diantaranya adalah memiliki komite audit atau bagi Calon

Perusahaan Tercatat yang belum memiliki Komite Audit wajib membuat pernyataan untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 (enam) bulan setelah perusahaan tersebut tercatat. Berdasarkan Peraturan Bapepam No IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, adalah sebagai berikut :

1. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit,
2. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja (piagam komite audit),
3. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris,
4. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang, 1 adalah Komisaris Independen dan 2 lainnya adalah berasal dari luar Emiten dan perusahaan publik.

Dimana, berdasarkan peraturan tersebut, persyaratan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta berkomunikasi dengan baik,
2. Salah seorang anggota Komite Audit memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan,
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca laporan keuangan,
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya,
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, pengacara, atau pihak yang memberi jasa audit, jasa non audit dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit,
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan

mengendalikan kegiatan Emiten dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit, kecuali Komisaris Independen,

7. Tidak memiliki saham dalam Emiten baik langsung maupun tidak langsung,
8. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama,
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung.

2.1.3.3 Kepemilikan Institusional

Jensen dan Meckling dalam Rahayu (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Dimana, dengan adanya investor institusional, diharapkan akan terjadi mekanisme monitoring bagi manajemen dalam membuat keputusan yang efektif untuk perusahaan. Kepemilikan institusional biasanya memiliki prosentase yang cukup besar, sehingga memiliki kemungkinan untuk memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

Menurut Nabela (2012), kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan prosentase. Kepemilikan institusional yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terbentuk dalam institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan perusahaan lainnya dibagi dengan saham yang beredar. Kepemilikan saham institusional dianggap sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi

agency conflict, sehingga dapat menjadi pengendali manajemen dalam melakukan kecurangan.

Menurut Nuraina (2012), kepemilikan institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lainnya). Kepemilikan institusional adalah perbandingan antara saham yang dimiliki oleh institusi dengan saham yang beredar. Dimana, institusi ini dapat berupa perusahaan asuransi, dana pensiun, Negara, maupun perusahaan lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, Negara, maupun perusahaan lainnya yang diukur dengan prosentase dan dihitung serta dilaporkan pada akhir tahun.

2.1.3.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau pihak intern perusahaan. Dengan kata lain, kepemilikan manajerial dapat disebut dengan kepemilikan saham oleh pihak dalam. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Indah (2018) semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan maka manajemen akan berupaya semakin giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.

Menurut Imanta dan Satwiko (2011) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Berdasarkan pengertian ini, kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pihak manajemen

atau kepemilikan saham pihak dalam. Dimana, manajemen akan memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingannya sebagai pengelola perusahaan dan kepentingannya sebagai pemilik saham atau pemilik perusahaan.

Menurut Faizal (2011) kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam prosentase. Berdasarkan pengertian ini, kepemilikan manajemen merupakan kepemilikan saham dari pihak manajemen perusahaan, dimana pemilik saham dapat secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Ukuran dari kepemilikan saham ini diukur dengan cara membandingkan kepemilikan saham oleh pihak intern perusahaan (manajemen) dengan saham yang beredar yang ditampilkan dalam bentuk prosentase pada akhir tahun.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham dari pihak intern perusahaan (manajemen) yang dinyatakan dalam prosentase pada akhir tahun, dimana manajemen tidak hanya berlaku sebagai pengelola perusahaan namun juga berkepentingan sebagai pemilik saham perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajemen akan mengurangi tingkat akrual abnormal, karena manajemen akan lebih berusaha untuk memenuhi kepentingan pemilik saham yang juga merupakan dirinya sendiri.

2.1.4 Independensi Auditor

Independensi bagi seorang auditor merupakan hal yang sangat penting dan perlu dijaga dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Independensi menurut Arens, dkk dalam Rahayu (2008) adalah mengambil sudut pandang yang tidak bias. Seorang auditor harus

independen dalam fakta, dimana auditor harus bisa mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan. Pengertian dari kata bias menurut KBBI adalah simpangan, belokan arah dari garis tempuh. Dimana, maksud tidak bias adalah seorang auditor harus memiliki sudut pandang yang tidak menyimpang atau berbelok dan tidak dipenuhi prasangka, melainkan melakukan proses audit sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dilapangan.

Independensi menurut Mulyadi (2010) dalam Tjun, dkk (2012) merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang lain. Berdasarkan pengertian ini, independensi merupakan sikap auditor yang melakukan prosedur audit sesuai dengan fakta dan bersikap objektif dalam melaksanakan prosedur audit. Dimana, auditor dalam menjalankan ataupun memberikan opini audit, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan dikendalikan oleh pihak manapun, baik itu perusahaan yang diaudit ataupun pihak lainnya.

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam No. Kep-20/PM/2002 peraturan nomor VIII.A.2 dijelaskan bahwa independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Peraturan ini mengatur bahwa ada batasan hubungan antara auditee dengan auditor, dimana auditee harus mengganti kantor akuntan public setiap 5 (lima) tahun sekali, dan mengganti auditor setiap 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini dilakukan agar independensi auditor tetap terjadi dan menjaga agar tidak terjadi hubungan yang dapat menyebabkan independensi auditor dipertanyakan atau diragukan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa independensi auditor merupakan sebuah sikap objektif dan sudut pandang yang tidak bias oleh auditor. Dimana, auditor harus menjaga independensinya agar dapat melaksanakan prosedur audit yang baik sehingga audit yang dihasilkan memiliki kualitas audit yang baik.

2.1.5 Kualitas Audit

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas apabila memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Dimana, standar ini terdiri atas mutu professional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam melaksanakan prosedur audit dan penyusunan laporan audit. Kualitas audit merupakan sebuah ukuran apakah pemeriksaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut de Angelo (1981) dalam Mahdi (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Berdasarkan pengertian ini, kualitas audit merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh auditor untuk mendeteksi, menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan yang sedang diauditnya.

Menurut Kane dan Velury (2005) dalam Rahayu (2018) kualitas audit merupakan sebuah tingkat kemampuan kantor akuntan public dalam memahami bisnis klien. Dimana kemampuan ini dinilai berdasarkan pengalaman auditor melakukan audit, pemahaman terhadap bisnis klien, patuh serta taat terhadap standar yang berlaku, bersikap independen dan skeptis (berhati-hati dan waspada), berkomitmen pada kualitas audit, melaksanakan prosedur audit sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menepati janji.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh auditee dan melaporkan hal tersebut dalam laporan audit. Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kepatuhan terhadap standar dan berlaku sesuai dengan kode etiknya, menggunakan kompetensi yang dimiliki, bersikap independen, dan memahami bisnis klien.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berpedoman pada penelitian terdahulu. Dimana, terdapat 3 penelitian yang dijadikan rujukan pada penelitian ini. Penelitian pertama adalah yang dilakukan oleh Bradbury, dkk (2004) yang meneliti tentang hubungan antara tata kelola perusahaan (yang diukur dengan karakteristik direktur independen dan komite audit) dengan kualitas akuntansi perusahaan (yang diukur dengan akrual abnormal). Hasil dari penelitian ini adalah negatif, yaitu tidak ditemukan adanya hubungan antara karakteristik direktur independen dengan akrual abnormal. Namun, menurut penelitian ini, ukuran dewan independen dan independensi komite audit terkait dengan kualitas akuntansi yang lebih tinggi, yaitu menurunkan akrual abnormal. Hasil penelitian lainnya adalah adanya hubungan antara karakteristik komite audit dengan akrual abnormal terjadi hanya ketika laba perusahaan meningkat. Ditemukan bahwa komite audit efektif dalam proses pelaporan keuangan dengan cara menurunkan laba dan meningkatkan akrual abnormal.

Penelitian lain dilakukan oleh Pujiati dan Arfan (2013) yang meneliti tentang struktur kepemilikan dan kompensasi bonus serta pengaruhnya terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Dimana, hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Prabowo (2014) meneliti pengaruh komisaris independen, independensi komite audit, ukuran dan jumlah pertemuan komite audit terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan komisaris independen dan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian lainnya yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016) yang meneliti tentang mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian ini adalah *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba, *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan dengan manajemen laba, *good corporate governance* dengan proksi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba, *good corporate governance* dengan proksi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba.

Penelitian berikutnya adalah penelitian oleh Qulub (2017) yang meneliti tentang pengaruh kualitas audit, independensi auditor, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas audit dan independensi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian lainnya adalah oleh Rahayu (2018) yang meneliti tentang determinan manajemen laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hasil penelitian menyatakan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan *free cash flow* dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Bradbury, dkk (2004)	<i>Board Characteristics, Audit Committee Characteristics</i>	Karakteristik direktur independen, Karakteristik komite audit	Tidak ditemukan adanya hubungan antara karakteristik direktur independen dengan akrual

		<i>and Abnormal Accruals</i>	independen, AkruaI abnormal.	abnormal, Adanya hubungan antara karakteristik komite audit dengan akruaI abnormal terjadi hanya ketika laba perusahaan meningkat.
2	Pujiati dan Arfan (2013)	Struktur Kepemilikan dan Kompensasi Bonus serta Pengaruhnya Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2006-2010	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Bonus.	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
3	Prabowo (2014)	Pengaruh Komisaris Independen, Independensi Komite Audit, Ukuran dan Jumlah Pertemuan	Komisaris independen, Independensi komite audit, Ukuran dan Jumlah pertemuan komite audit.	Ukuran dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan komisaris independen dan

		Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2012.		independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
4	Pratiwi (2016)	Analisis Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, Dewan komisaris independen, Komite audit.	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba, Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan dengan manajemen laba, Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba, Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba.

5	Qulub (2017)	Pengaruh Kualitas Audit, Independensi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba	Kualitas Audit, Independensi Auditor, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas.	Kualitas audit dan independensi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
6	Rahayu (2018)	determinan manajemen laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016	Proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, independensi auditor, kualitas audit, dan <i>free cash flow</i> .	Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan <i>free cash flow</i> dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

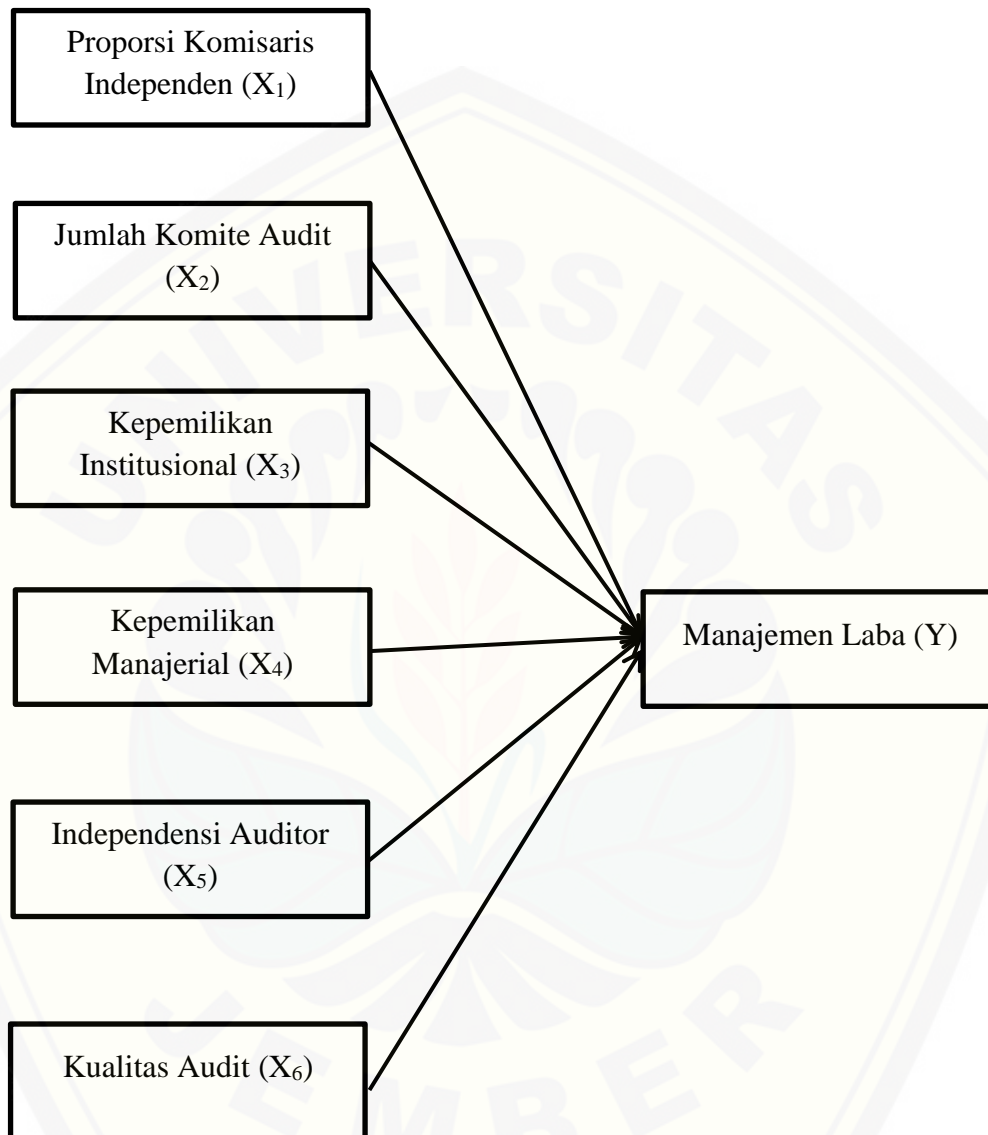
Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Dimana teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* menginginkan manajer untuk mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga mendapatkan keuntungan yang tinggi dan mensejahterakan para *stakeholders*. Sedangkan *agent* menginginkan pekerjaan yang ringan dengan imbal jasa yang tinggi.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Pemilik perusahaan akan memberikan wewenang kepada manajer untuk menjalankan perusahaannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, manajer harus melaporkan kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Namun, pada praktiknya, manajer mengelabui *principal* dengan cara memanipulasi laporan keuangan pada bagian laba.

Penyajian laporan keuangan perusahaan diharuskan menggunakan akrual basis yang diatur dalam PSAK Nomor 1 paragraf 27 (IAI, 2017), yaitu “entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas”. Dimana berdasarkan PSAK Nomor 1 (IAI, 2017), prinsip akrual melibatkan estimasi, pemilihan kebijakan akuntansi, alokasi, serta keputusan yang melibatkan manajemen yang bersifat subjektif. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu jalan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Akrual yang digunakan untuk melakukan manajemen laba disebut dengan akrual abnormal. Dimana akrual abnormal adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas serta tidak diatur dan merupakan kebijakan manajemen (Satwika dan Damayanti, 2005).

Menurut Istianingsih (2016) salah satu kunci yang bisa diterapkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan agar sejalan dengan kepentingan para *stakeholders* adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan *good corporate governance*. Dimana, penerapan dari tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari manajer perusahaan sehingga dapat memberikan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang jujur dan wajar.

Penelitian ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016), terdapat empat mekanisme *good corporate governance*, yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Namun, sekaligus berpedoman pada penelitian yang dilakukan Bradburry, dkk (2004), mekanisme tata kelola perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Selain itu, penelitian ini juga akan berpedoman pada penelitian Rahayu (2018) dengan menambahkan independensi auditor dan kualitas audit..



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2010). Hipotesis memiliki sifat sementara, dan perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1 Proporsi Komisaris Independen

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan teori ini, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi *agency conflict* adalah dengan menerapkan *good corporate governance*. Dimana, salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan memiliki komisaris independen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan public dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Setiap perusahaan yang *go public* harus memiliki minimal 1 orang komisaris independen atau 30% anggota dewan komisaris diisi dengan komisaris independen. Komisaris independen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas manajemen, dimana komisaris independen harus memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan dengan manajemen laba, dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba, dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan dengan manajemen laba. ukuran dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba, sedangkan komisaris independen dan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2014) juga menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dewan komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi dewan direksi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dimana, komisaris independen perlu memastikan apakah dewan direksi telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, telah mengisi posisi penting dalam perusahaan diisi dengan pihak yang profesional, dan telah memperlakukan seluruh *stakeholders* dengan baik dan adil. Dengan adanya dewan komisaris, maka akan ada pihak independen yang mengawasi dewan direksi sehingga semakin banyak anggota komisaris independen akan meminimalisir motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

H1 : Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akurasi abnormal.

2.4.2 Jumlah Komite Audit

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan teori ini, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi *agency conflict* adalah dengan menerapkan *good corporate governance*. Dimana, salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan memiliki komite audit.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia, melalui webnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan kepada perusahaan. Hal ini mencakup

review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas lainnya dari komite aduit adalah penelahaan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan aturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016) menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu Defond dan Jiambalvo dalam Bradbury, dkk (2004) menemukan bahwa manajemen laba jarang ditemukan pada perusahaan dengan komite audit. Sementara, Klein dalam Bradbury, dkk (2004) memberikan bukti bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara independensi komite audit dengan akrual abnormal. Komite audit memiliki tugas untuk memastikan apakah prosedur akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan adanya komite audit, akan ada pihak independen dalam perusahaan yang mengawasi manajemen dalam melaksanakan prosedur akuntansi sehingga akan meminimalisir motivasi manajemen dalam melaksanakan manajemen laba.

H2 : Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui akrual abnormal.

2.4.3 Kepemilikan Institusional

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan teori ini, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi *agency conflict* adalah dengan menerapkan *good corporate governance*. Dimana, salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik adalah kepemilikan institusional.

Menurut Nabela (2012), kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan prosentase. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang

dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, Negara, maupun perusahaan lainnya yang diukur dengan prosentase dan dihitung serta dilaporkan pada akhir tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Jensen dan Meckling dalam Rahayu (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Dimana, dengan adanya investor institusional, diharapkan akan terjadi mekanisme monitoring bagi manajemen dalam membuat keputusan yang efektif untuk perusahaan. Kepemilikan institusional biasanya memiliki prosentase yang cukup besar, sehingga memiliki kemungkinan untuk memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kepemilikan institusional dapat meminimalisir tindakan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan melalui akrual abnormal.

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal

2.4.4 Kepemilikan Manajerial

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan teori ini, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi *agency conflict* adalah dengan menerapkan *good corporate governance*. Menurut Sartono (2010) dalam Lusiana (2014), usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan pemberian kompensasi yang cukup berupa kompensasi minimum, kompensasi tambahan dan pemberian *stock option*, yaitu hak untuk membeli saham perusahaan dimasa datang dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan dimuka. Pemberian *stock option*

diharapkan dapat menurunkan konflik keagenan, karena semakin baik kinerja perusahaan maka harga saham perusahaan akan semakin tinggi. Dimana, kepemilikan saham oleh pihak dalam perusahaan disebut dengan kepemilikan manajerial.

Menurut Imanta dan Satwiko (2011) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham dari pihak intern perusahaan (manajemen) yang dinyatakan dalam prosentase pada akhir tahun, dimana manajemen tidak hanya berlaku sebagai pengelola perusahaan namun juga berkepentingan sebagai pemilik saham perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiati dan Arfan (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Jensen dan Meckling dalam Rahayu (2018) semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan maka manajemen akan berupaya semakin giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Dengan adanya kepemilikan manajemen akan mengurangi tingkat akrual abnormal, karena manajemen akan lebih berusaha untuk memenuhi kepentingan pemilik saham yang juga merupakan dirinya sendiri. Akrual abnormal dilakukan oleh manajemen untuk mengelabui investor atau pemegang saham, namun disaat manajemen juga merupakan pemegang saham, hal ini akan mempengaruhi besaran akrual abnormal.

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal.

2.4.5 Independensi Auditor

Independensi menurut Arens, dkk (dalam Indah, 2008) adalah mengambil sudut pandang yang tidak bias. Seorang auditor harus independen dalam fakta, dimana auditor harus bisa mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan. Selain itu, auditor juga tidak boleh berada dalam pengaruh pihak

lain. Dimana, auditor dalam menjalankan ataupun memberikan opini audit, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan dikendalikan oleh pihak manapun, baik itu perusahaan yang diaudit ataupun pihak lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Qulub (2017) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Independensi auditor merupakan sebuah sikap objektif dan sudut pandang yang tidak bias oleh auditor. Dimana, auditor harus menjaga independensinya agar dapat melaksanakan prosedur audit yang baik sehingga audit yang dihasilkan memiliki kualitas audit yang baik. Dengan adanya independensi auditor, maka manajemen akan kesulitan dalam melakukan akrual abnormal karena berkemungkinan terdeteksi oleh auditor yang merupakan pihak independen dan tidak berada dalam pengaruh manajemen perusahaan.

H5 : Independensi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui akrual abnormal

2.4.6 Kualitas Audit

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) terdiri atas mutu professional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam melaksanakan prosedur audit dan penyusunan laporan audit. Menurut de Angelo dalam Mahdi (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. dimana, kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh auditee dan melaporkan hal tersebut dalam laporan audit. Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kepatuhan terhadap standar dan berlaku sesuai dengan kode etiknya, menggunakan kompetensi yang dimiliki, bersikap independen, dan memahami bisnis klien. Audit yang berkualitas akan mampu menemukan

kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dan hal ini akan mempengaruhi manajemen dalam melakukan akrual abnormal.

H6 : Kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang diprosikan melalui akrual abnormal



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono dalam Febrianti (2016) dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah dalam mendapatkan data yang nantinya diolah dan dikembangkan untuk memecahkan masalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dimana menurut Sugiyono dalam Febrianti (2016) penelitian kuantitatif adalah :

"Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Menurut Indrianto dan Supomo (2014) variabel dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono dalam Febrianti (2016), pengertian dari populasi adalah :

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

Menurut Sugiyono dalam Febrianti (2016), pengertian dari sampel adalah :

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”.

Sampel dalam penelitian ini adalah BUMN yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Pemilihan perusahaan BUMN sebagai sampel adalah karena menurut laporan survey ACFE yang dilakukan di Indonesia tahun 2016 dinyatakan bahwa jenis organisasi atau lembaga yang paling dirugikan akibat *fraud* secara berturut-turut adalah pemerintah dan perusahaan negara atau BUMN. Sedangkan menurut jenis industrinya secara berturut-turut adalah pemerintah, industri keuangan dan perbankan, industri perikanan dan kelautan, dan seterusnya.

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Kriteria yang digunakan adalah perusahaan BUMN selain lembaga keuangan atau bank, karena sektor ini cenderung memiliki arus kas dan penerapan akrual yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan sektor perusahaan lainnya. Kriteria lainnya adalah perusahaan BUMN tersebut harus melaporkan laporan keuangan auditan dan laporan tahunan selama 2013-2017. Semen Baturaja dikecualikan karena sahamnya disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia sejak 31 Agustus 2016.⁴

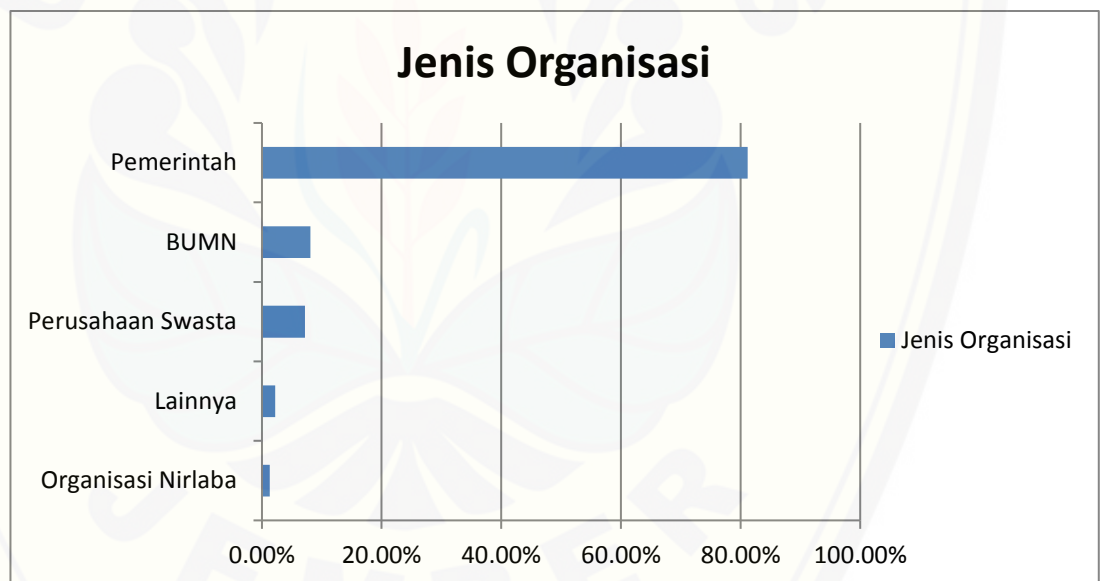
⁴ Okezone, “Saham Semen Baturaja Disuspensi Bursa”, <https://economy.okezone.com/saham-semen-baturaja-disuspensi-bursa>, (diakses pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 14.05)

Tabel 3.1
Tahapan Seleksi Sampel Penelitian

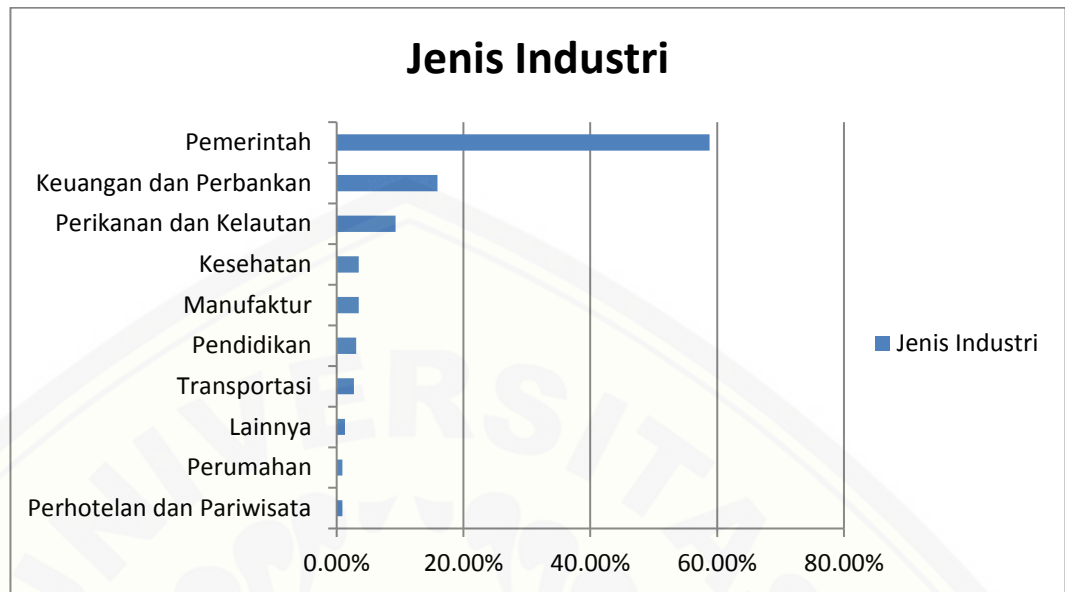
Keterangan	Jumlah
Jumlah Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017.	20
Jumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria sampel (4 perusahaan lembaga keuangan atau bank, 1 perusahaan yang disuspensi oleh BEI sejak tahun 2016)	5
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian (periode 2013-2017)	$15 \times 5 = 75$

Sumber : data sekunder yang diolah, 2019

Gambar 3.1 Organisasi atau Lembaga yang Dirugikan Akibat
Fraud



Sumber : Laporan Survei ACFE Indonesia 2016

Gambar 3.2 Industri yang Dirugikan oleh *Fraud*

Sumber : Laporan Survei ACFE Indonesia 2016

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka BUMN yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ADHI	PT Adhi Karya Tbk
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
3	GIAA	PT Garuda Indonesia Tbk
4	INAF	PT Indofarma Tbk
5	JSMR	PT Jasa Marga Tbk
6	KAEF	PT Kimia Farma Tbk
7	KRAS	PT Krakatau Steel Tbk
8	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
9	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
10	PTPP	PT Pembangunan Perumahan Tbk
11	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk
12	TINS	PT Timah Tbk
13	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
14	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk
15	WSKT	PT Waskita Karya Tbk

Sumber : www.idx.co.id

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program (Indrianto dan Supomo, 2014). Data dokumenter yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2017.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2014:147). Sumber data dalam penelitian ini adalah situs resmi dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs resmi masing-masing perusahaan yang akan diteliti.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya (Indrianto dan Supomo, 2014). Dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Proporsi Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Bab III, Bagian Kesatu, Pasal 20 ayat (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Dimana, data yang digunakan didominasi oleh nilai 30% atau 0,33 dan hanya beberapa saja yang memiliki nilai selain 30% atau 0,33. Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan bahwa teori agensi mendukung pernyataan bahwa untuk meningkatkan independensi dewan (komisaris), maka dewan harus

didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan. Pengukuran proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan prosentase dari komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris perusahaan pada periode tersebut.

b. Jumlah Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/02/2012 Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 11 ayat (3) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Bapepam No IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit angka 4, Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang, 1 adalah Komisaris Independen dan 2 lainnya adalah berasal dari luar Emiten dan perusahaan publik. Ukuran komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit perusahaan pada periode tersebut.

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham prosentase saham yang dimiliki institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lainnya) (Nuraina, 2012). Dimana, kepemilikan saham yang akan dihitung dalam penelitian ini adalah diukur dengan prosentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya, dibandingkan dengan total saham beredar perusahaan.

d. Kepemilikan Manajerial

Menurut Imanta dan Satwiko (2011) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial yang akan dihitung dalam penelitian ini diukur dengan prosentase dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dibandingkan dengan saham beredar perusahaan.

e. Independensi Auditor

Auditor juga tidak boleh berada dalam pengaruh pihak lain. Dimana, auditor dalam menjalankan ataupun memberikan opini audit, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan dikendalikan oleh pihak manapun, baik itu perusahaan yang diaudit ataupun pihak lainnya. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam No. Kep-20/PM/2002 peraturan nomor VIII.A.2 dijelaskan bahwa independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Peraturan ini mengatur bahwa ada batasan hubungan antara auditee dengan auditor, dimana auditee harus mengganti kantor akuntan public setiap 5 (lima) tahun sekali, dan mengganti auditor setiap 3 (tiga) tahun sekali. Variabel independensi auditor diukur dengan variabel *dummy*, dimana akan diberikan angka 0 apabila perusahaan menggunakan auditor yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan angka 1 apabila perusahaan mengganti auditornya kurang dari 3 (tiga) tahun.

f. Kualitas Audit

Menurut de Angelo dalam Mahdi (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy*, dimana akan diberikan angka 0 apabila perusahaan menggunakan

auditor dari KAP *non-Big Four*, dan angka 1 apabila perusahaan menggunakan auditor dari KAP *Big Four*.

Operasionalisasi variabel independen dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, independensi auditor, kualitas auditor. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Independen

Variabel Independen : proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris (X_1), jumlah komite audit (X_2), kepemilikan institusional (X_3), kepemilikan manajerial (X_4), independensi auditor (X_5), kualitas auditor (X_6)

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Proporsi komisaris independen (X_1)	Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan	Dinilai dengan prosentase dari komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris perusahaan pada periode tersebut.	Skala Rasio.

	perusahaan (Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> , 2006).		
Jumlah Komite Audit (X_2)	Menurut Effendy dalam Chrisdianto (2013), salah satu tugas komite audit adalah menjembatani pemegang saham atau <i>stakeholders</i> dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor internal dan auditor eksternal.	Dinilai sesuai dengan jumlah komite audit dalam perusahaan.	Skala Nominal.
Kepemilikan Institusional (X_3)	Menurut Nabela (2012), kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan prosentase.	Dinilai sejumlah prosentase kepemilikan saham oleh institusi (bank, dana pensiun, pemerintah, institusi asing) dibandingkan saham yang beredar.	Skala Rasio.

Kepemilikan Manajerial (X ₄)	Menurut Imanta dan Satwiko (2011) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.	Dinilai sejumlah prosentase kepemilikan saham oleh manajemen dibandingkan saham yang beredar.	Skala Rasio.
Independensi Auditor (X ₅)	Independensi menurut Arens, dkk (dalam Indah, 2008) adalah mengambil sudut pandang yang tidak bias.	Angka 0 apabila perusahaan menggunakan auditor yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan angka 1 apabila perusahaan mengganti auditornya kurang dari 3 (tiga) tahun.	<i>Variabel Dummy</i>
Kualitas Audit (X ₆)	Menurut de Angelo dalam Mahdi (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai	Angka 0 apabila perusahaan menggunakan auditor dari KAP <i>non-Big Four</i> , dan angka 1	<i>Variabel Dummy</i>

	probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.	apabila perusahaan menggunakan auditor dari KAP <i>Big Four</i> .	
--	---	---	--

3.4.2 Variabel Dependen

Menurut Indrianto dan Supomo (2014) variabel dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akrual abnormal (ACCRUALS).

Pengukuran akrual yang digunakan pada penelitian ini adalah model Jones yang dimodifikasi (Indah, 2018) yaitu :

$$TAC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Nilai *total accrual* (TA) diestimasi dengan persamaan regresi linier berganda yang berbasis OLS sebagai berikut :

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{it-1}} \right) + e$$

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{it-1}} \right)$$

Selanjutnya, *discretionary accrual* (DA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Dimana :

TAC_{it} = Total *accruals* perusahaan *i* pada periode *t*

N_{it} = Laba bersih perusahaan *i* pada periode *t*

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan *i* pada periode *t*

A_{it-1} = Total aset perusahaan *i* pada periode *t*

ΔREV_t = Perubahan pendapatan perusahaan *i* pada tahun *t-1* ke tahun *t*

ΔREC_t = Perubahan piutang perusahaan *i* pada tahun *t-1* ke tahun *t*

PPE_t = Aset tetap perusahaan tahun *t*

DA_{it} = *Discretionary accruals* perusahaan *i* pada periode *t*

NDA_{it} = *Non-discretionary accruals* perusahaan *i* pada periode *t*

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Error

Operasionalisasi variabel dependen dalam penelitian ini adalah akrual abnormal Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel Dependen

Variabel Dependen : Akrual Abnormal (Y)

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Akrual Abnormal (Y)	Akrual abnormal adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas serta tidak diatur dan merupakan kebijakan manajemen (Satwika dan Damayanti, 2005)	$ACCRUALS$ $= \alpha_0$ $+ \alpha_1 BDIND$ $+ \alpha_2 BDSIZE$ $+ \alpha_3 ACIND$ $+ \alpha_4 INOWN$ $+ \alpha_5 MGROWN$ $+ \alpha_6 INDP$ $+ \alpha_7 KAUD + \varepsilon$	Skala Rasio

3.5 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan setelah terkumpulnya seluruh data. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono dalam Febrianti, 2016). Berikut adalah analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini :

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis, perlu dilakukan uji asumsi klasik agar penelitian tidak bias dan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Dimana, pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

i. Uji Normalitas Data

Priyatno dalam Febrianti (2016) menyatakan bahwa uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan tes Kolmogorov Smirnov. Dimana dasar pengambilan keputusannya adalah

H_0 = Sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal, apabila nilai probabilitas (sig) $\geq \alpha$

H_a = Sampel diambil bukan dari populasi yang berdistribusi normal, apabila nilai probabilitas (sig) $\leq \alpha$

Dengan $\alpha = 0.05$

ii. Uji Autokorelasi

Menurut Priyatno dalam Febrianti (2016) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah auto korelasi. Dimana, menurut Santoso dalam Febrianti (2016) menyebutkan bahwa model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Apabila $DW < DL$ atau $DW > 4DL$, terdapat autokorelasi,

Apabila $DU < DW < 4DU$, tidak ada autokorelasi

Apabila $DL < DW < DU$ atau $4DL < DW < 4DL$, tidak ada kesimpulan yang pasti

iii. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ditemukan atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Priyatno dalam Febrianti, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independennya. Untuk mengetahui hasil uji ini, digunakan besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Regresi yang tidak mengandung

multikolinieritas, angka Tolerance-nya mendekati 1, dengan nilai VIF dibawah 10.

iv. Uji Heteroskedastitas

Priyatno dalam Febrianti (2016) menyatakan bahwa heteroskedastitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain, dimana model regresi yang baik adalah tidak mengandung heteroskedastitas. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada *scattplots* regresi dengan cara melihat grafik *scattplot* antara *standarized value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID). Apabila terdapat pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastitas. Apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar maka tidak terjadi heteroskedastitas. Pengujian lainnya dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Apabila korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikansi dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastitas. Kemudian dilakukan pengujian dengan *Spearman's Rho*, yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual* model regresi.

b. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Dimana analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) dua atau lebih. Tujuannya adalah untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel terikat.⁵ Rumus persamaan regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

⁵ Augustine, Yvonne dan Robert Kristaung, Metode Penelitian Bisnis dan Akuntansi, 2013, PT Dian Rakyat, Jakarta.

$$\text{ACCRUALS} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{BDIND} + \alpha_2 \text{BDSIZE} + \alpha_3 \text{ACIND} + \alpha_4 \text{INOWN} + \alpha_5 \text{MGROWN} + \alpha_6 \text{INDP} + \alpha_7 \text{KAUD} + \varepsilon$$

Dimana :

ACCRUALS = ukuran dari akrual abnormal,

BDIND = proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris,

BDSIZE = ukuran atau jumlah dewan komisaris,

ACIND = jumlah komite audit,

INOWN = proporsi dari kepemilikan institusional,

MGROWN = proporsi kepemilikan manajerial,

INDP= independensi auditor,

KAUD = kualitas audit,

Pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

i. Uji Statistik t

Uji statistic t perlu dilakukan untuk menentukan tingkat signifikan secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ secara dua arah, yaitu membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} . Dengan kriteria :

1. H_0 diterima apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$, variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. H_0 ditolak apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$, variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

ii. Uji Kelayakan Model

Menurut Sugiyono dalam Febrianti (2016) uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya dengan taraf signifikan 0,05.

1. Apabila angka signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima
2. Apabila angka signifikan $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak

iii. Koefisien Determinasi

Setelah dilakukan kedua uji diatas, dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi. Menurut Sugiyono dalam Febrianti (2016) analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance*, independensi auditor dan kualitas auditor terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui akrual abnormal. Variabel-variabel tersebut diproksikan melalui proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris (BDIND), jumlah komite audit (ACIND), kepemilikan institusional (INOWN), kepemilikan manajerial (MGROWN), independensi auditor (INDP), kualitas auditor (KAUD). Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris (BDIND) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui akrual abnormal.
- b. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah komite audit (ACIND) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui akrual abnormal.
- c. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional (INOWN) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui akrual abnormal.
- d. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial (MGROWN) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui akrual abnormal.

- e. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi auditor (INDP) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui akrual abnormal.
- f. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas auditor (KAUD) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui akrual abnormal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sampel penelitian ini hanya menggunakan kategori untuk Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan melaporkan laporan keuangan auditan dari tahun 2013-2017. Dimana, BUMN memiliki aturan yang harus dipatuhi terkait rangkap jabatan dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit.
- b. Peneliti hanya menggunakan 6 variabel eksperimental dan nilai *adjusted R square* pada penelitian ini hanya 0,231 sehingga kemampuan untuk menjelaskan variabel lain masih terbatas.
- c. Indikator pengukuran independensi auditor hanya menggunakan pengukuran waktu atau *timeline* sehingga kurang merefleksikan sikap independensi dari auditor.

5.3 Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel lain atau menambah jumlah sampel kategori perusahaan agar dapat

memprediksi manajemen laba perusahaan yang diprosikan melalui akrual abnormal pada sektor perusahaan lain.

- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel dependen yang lain sebagai pengukur dari manajemen laba. Variabel dependen lain mungkin dapat digunakan selain akrual abnormal untuk menilai manajemen laba. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain sehingga semakin dapat menjelaskan variabel apa saja yang dapat mempengaruhi manajemen laba.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator pengukuran lain terkait independensi auditor, misalnya menggunakan kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Semarang : Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Agoes, S., I. C. Ardana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi : Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*, Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Arunjati, Maria. 2011. Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Thesis*. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.
- Bradburry, M. E., Y. T. Mak, dan S. M. Tan. 2004. *Board Characteristics, Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals*.
- Claudya, Ursula dan Pratiwi Budiharta. 2014. Analisis Perbedaan Kualitas Akuntansi Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Chrisdianto, B. 2013. Peran Komite Audit dalam *Good Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 2, Nomor 1.
- Febrianti, L. 2016. Pengaruh *Financial Leverage*, Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Stuktur Kepemilikan Terhadap Praktik Perataan Laba (Suatu Studi Pada Perusahaan Manufaktur *Food and Beverages* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Skripsi*. Bandung : Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- Herawaty, Vinola. 2008. Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variabel dari Pengaruh Earning Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Journal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 10, Nomor 2, Tahun 2008.
- Ikatan Komite Audit. (www.komiteaudit.or.id/tentang-komite-audit/) diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.
- Imanta, Dead an Rutji Satwiko. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Manajerial. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Volume 13, Nomor 1, 2011.

- Indrianto dan Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Jensen, M. C and Meckling. 1976. Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*. Volume 3, Nomor 4, Tahun 1976.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (kbbi.web.id) diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-20/PM/2002. 12 Nopember 2002. *Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal*. Jakarta : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.I.5 Kep 29-29/PM/2004. 24 September 2004. *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002. 31 Juli 2002. *Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002. Jakarta.
- Kusindratno, R. dan Sumarta, N. H. 2005. Indikasi Manajemen Laba dalam Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ekonomi Unmer*. Volume 9, Nomor 1, Tahun 2005.
- Lusiana, L. 2014. Analisis Komparatif Kebijakan Hutang, Kebijakan Deviden, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Dengan Kepemilikan dan Tanpa Kepemilikan Manajerial : Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012. *Skripsi*. Purwokerto : Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Mahdi, Suriana A. R. 2014. Analisis Faktor-faktor Penentu Kualitas Audit dengan Moral Judgement Sebagai Pemoderasi : Studi Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Volume 11, Nomor 1, Tahun 2014.
- Nabela, Yoandhika. 2012. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen*. Volume 01, Nomor 01, Tahun 2012.

- Noviardhi, M. T., P. B. Hadiprajitno. 2013. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1 ISSN (Online) : 2337-3809.
- Nuraina, Elva. 2012. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Tahun 2012.
- Nuryaman. 2009. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 6 , Nomor 1.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012. 06 Juli 2012. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER/01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada BUMN*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Jakarta.
- Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014. *Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. 8 Desember 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2017). *Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia.
- Prabowo, Danuharja Arvin. 2014. Pengaruh Komisaris Independen, Independensi Komite Audit, Ukuran dan Jumlah Pertemuan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba : Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014.
- Pratiwi, F. L., R. A. Endang, dan N. Purwanto. 2016. Analisis Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi*. ISSN: 2337-56xx. Volume: xx, Nomor: xx.
- Pujiati, E. J dan Arfan, M. 2013. Struktur Kepemilikan dan Komposisi Bonus serta Pengaruhnya Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2013.
- Putri, Dinda Fidela. 2018. Kemampuan AkruaI dalam Memprediksi Arus Kas Masa Depan : Bukti Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek

- Indonesia. *Skripsi*. Semarang : Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Qulub, Rezky E. T. 2017. Pengaruh Kualitas Audit, Independensi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 6, Nomor 5, Tahun 2017.
- Rahayu, Vika Indah., Afrizal., Enggar Diah Puspa Arum. 2018. Determinan Manajemen Laba Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Magister Ilmu Akuntansi Universitas Jambi*. Volume 3, Nomor 4, Tahun 2018.
- Rifani, A. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Hubungan Manajemen dan Kualitas Laba (Studi Empiris pada Perusahaan *Go Public* yang Terdaftar di CGPI). *Skripsi*. Padang : Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- Satwika, A., T. W. Damayanti. 2005. Deteksi Manajemen Laba Melalui Beban Pajak Tanggahan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 11, Nomor 1, Tahun 2005.
- Scott, D. Dyreng, M. Hanlon, E. L. Maydew. 2012. *Review of Accounting Studies*. Volume 12, Nomor 3, Tahun 2012.
- Scott, William R. 2009. *Financial Accounting Theory*. Fifth Edition. Canada : Prentice Hall.
- Sefiana, Eka. 2008. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan yang Telah Go Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Volume VIII, Nomor 1, Tahun 2008.
- Suhendah, R., E. Imelda. 2012. Pengaruh Informasi Asimetri, Kinerja Masa Kini dan Kinerja Masa Depan Terhadap *Earning Managements* Pada Perusahaan Manufaktur yang *Go Public* dari Tahun 2006-2008. *Jurnal Akuntansi*. Volume XVI, ISSN: 1410-3591.
- Sulistyanto, H. Sri. 2008. *Manajemen Laba : Teori dan Model Empiris*. Jakarta : Grasindo.
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00100/BEI/10-2014 Peraturan No. I.A. *Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan*. 1 November 2014. Jakarta : PT Bursa Efek Indonesia.

- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Tjun Tjun, Law.,E. I. Marpaung., dan Santy Setiawan. 2012. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*. Volume 6, Nomor 1.
- Tuanakotta, T. M. 2017. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ujiyantho, M. A., B. A. Pramuka. 2007. Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Perusahaan *Go Public* Sektor Manufaktur. *Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hasanuddin*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. *Perseroan Terbatas*. 16 Agustus 2007. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. *Pasar Modal*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8. Jakarta.
- Warianto, Paulina. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal Likuiditas dan *Investment Opportunity Set (IOS)* Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta MODUS*. Volume 26, Nomor 1, Tahun 2013.
- William. 2015. Analisis Pengaruh Kualitas Akrua (*Accruals Quality*) Terhadap Sinkronitas Harga Saham (*Stock Price Synchronicity*) : Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Medan : Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Lampiran I Uji Asumsi Klasik**a) Uji Normalitas Data****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardi zed Residual
N		75
Normal	Mean	.0000000
Parameters(a,b)	Std. Deviation	.15890055
Most Extreme	Absolute	.098
Differences	Positive	.079
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.848
Asymp. Sig. (2-tailed)		.469

b) Uji Autokorelasi**Model Summary^b**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.536 ^a	.287	.213	.07014	2.098

Dependent Variable: ACCRUALS

c) Uji Multikolinieritas

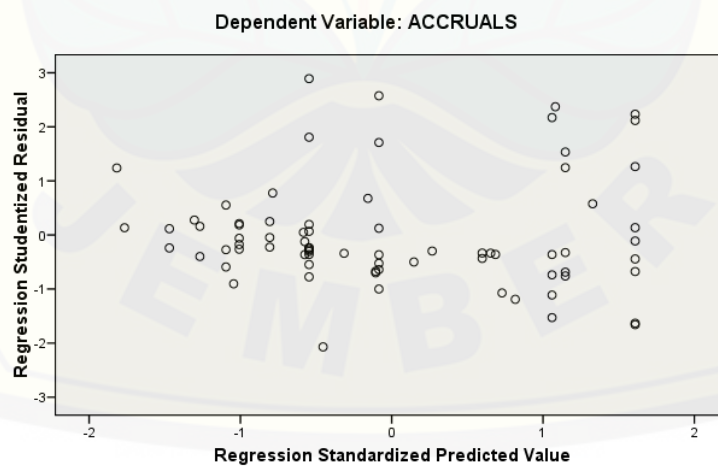
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-0,179	0,081		-2.223	0.030		
BDIND	0,216	0,128	0,180	1.691	0.095	0.936	1.069
ACIND	-0,021	0,010	-0,263	-2.181	0.033	0.733	1.365
INOWN	0,147	0,087	0,235	1.696	0.094	0.554	1.807
MGROWN	0,568	0,522	0,125	1.089	0.280	0.804	1.243
INDP	0,030	0,022	0,145	1.382	0.171	0.961	1.041
KAUD	-0,053	0,021	-0,330	-2.495	0.015	0.608	1.643

a Dependent Variable: ACCRUALS

d) Uji Heterokedastisitas

Scatterplot



Lampiran II Uji Hipotesis

a) Koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.536 ^a	.287	.213	.07014

a Predictors: (Constant), KAUD, BDIND, INDP, INOWN, MGROWN, ACIND.

b Dependent Variable: ACCRUALS

b) Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,179	0,081		-2.223	0.030
	BDIND	0,216	0,128	0,180	1.691	0.095
	ACIND	-0,021	0,010	-0,263	-2.181	0.033
	INOWN	0,147	0,087	0,235	1.696	0.094
	MGROWN	0,568	0,522	0,125	1.089	0.280
	INDP	0,030	0,022	0,145	1.382	0.171
	KAUD	-0,053	0,021	-0,330	-2.495	0.015

a Dependent Variable: ACCRUALS

c) Uji F

ANOVA^b

Mode		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.133	6	.019	3.857	.001 ^a
	Residual	0.330	68	.005		
	Total	0.462	74			

a Predictors: (Constant), KAUD, INDP, INOWN, MGROWN, ACIND, BDSIZE

b Dependent Variable: ACCRUALS

Lampiran III Dewan Komisaris Perusahaan

Kriteria Independensi Komisaris (Perusahaan Aneka Tambang Tbk. Tahun 2013)

Kriteria Independensi ASX ASX Independency Criteria	R. Sukhyar	Robert Pakpahan*	Valix Vernando Wanggal*	Zaelani	Hikmahanto Juwana	Laode M. Kamaluddin
Bukan bagian dari manajemen. Not a member from management.	√	√	√	√	√	√
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan. Free of any business or other relationship that could materially interface judgement	√	√	√	√	√	√
Bukan pemegang saham mayoritas atau pejabat pada institusi pemegang saham mayoritas, atau terasosiasi langsung dengan pemegang saham mayoritas. Not substantial shareholder of the company or an officer or associated directly with a substantial shareholder or the company.	X	X	X	X	√	√
Bukan karyawan atau pernah dipekerjakan sebagai eksekutif pada Perusahaan/perusahaan afiliasi, setidaknya 3 tahun sebelum menjadi Komisaris. Not an employee or has previously been employed in an executive capacity by the company or another group member, at least in three years before serving the board.	√	√	√	√	√	√
Bukan penasihat atau konsultan utama yang material bagi perusahaan/perusahaan afiliasi, atau karyawan yang terasosiasi langsung dengan penyediaan jasa, setidaknya 3 tahun sebelum menjadi Komisaris.** Not has within the last three years been a principal of a material professional adviser or a material consultant to the company or another group member, or an employee materially associated with the service provided.**	√	√	√	√	√	√
Bukan pemasok/pelanggan utama yang material dari perusahaan/perusahaan afiliasi atau pejabat pada perusahaan pemasok/pelanggan utama, atau terasosiasi secara langsung maupun tidak langsung dengan pemasok/pelanggan utama.** Not a material supplier or customer of the company or other group member, or an officer of, or associated directly or indirectly with a material supplier or customer.**	√	√	√	√	√	√
Tidak terikat dalam perjanjian yang material dengan perusahaan/perusahaan afiliasi selain sebagai Komisaris.** Does not have a material contractual relationship with the company or another group member other than as a director.**	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda serta memegang posisi direktur di tempat lain yang dapat mempengaruhi independensi. Does not have any family ties and cross directorship which may affect independency.	√	√	√	√	√	√
Status	X	X	X	X	Independent	Independent
√ = Independen X = Tidak Independen						

* Mula diangkat sebagai Komisaris pada RUPS 30 April 2013
Appointed at the GMS, April 30, 2013

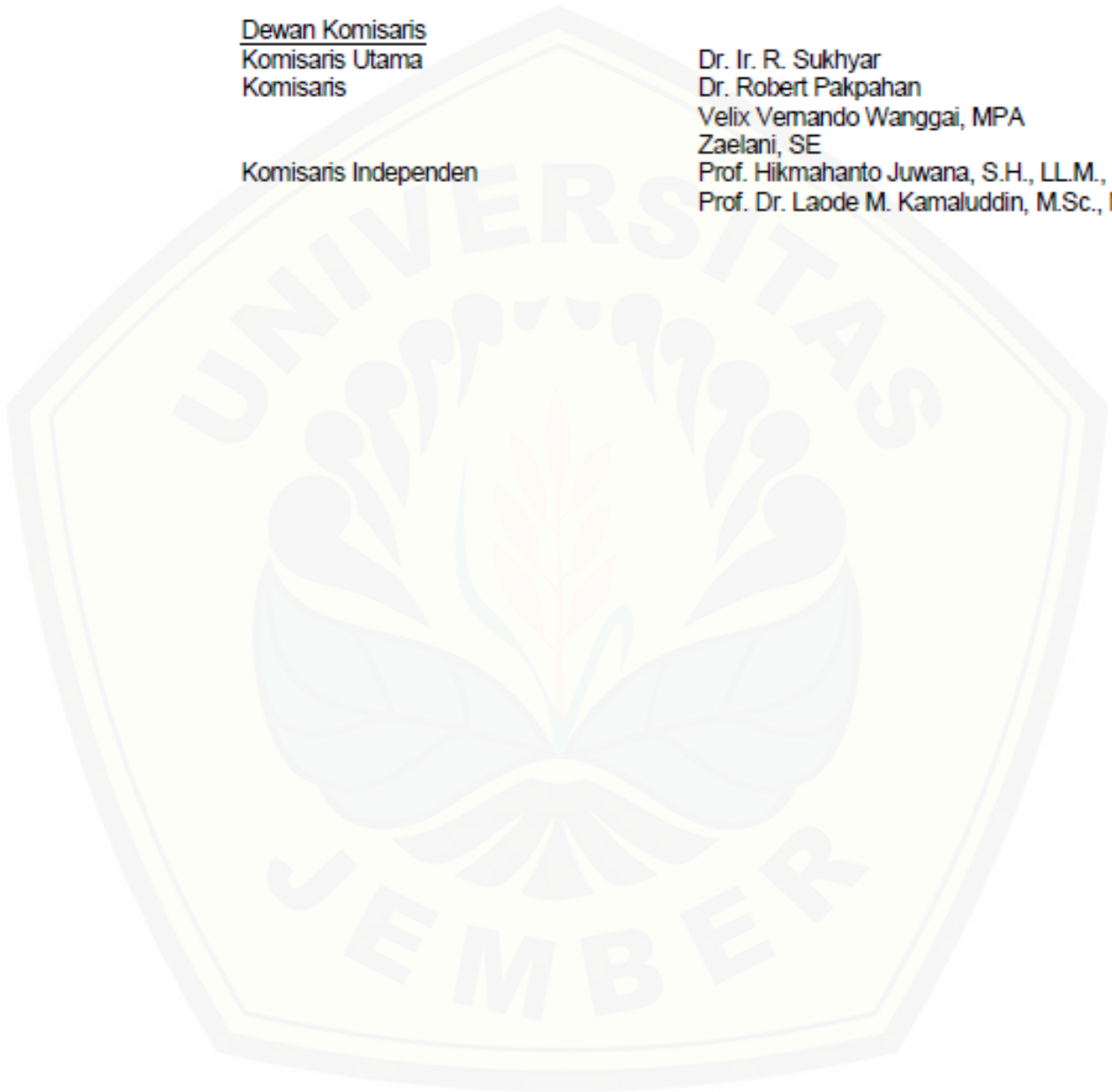
** Perusahaan menggunakan batasan material sebesar Rp0
Company use material limit Rp0

Daftar Dewan Komisaris (Perusahaan Aneka Tambang Tbk. Tahun 2013)

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

Dr. Ir. R. Sukhyar
Dr. Robert Pakpahan
Velix Vemando Wanggai, MPA
Zaelani, SE
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng.

Komisaris Independen



Lampiran IV Anggota Komite Audit Perusahaan

Susunan Komite Audit (Perusahaan Aneka Tambang Tbk. Tahun 2013)

Struktur Keanggotaan Anggota Komite Audit Tahun 2013
Audit Committee's 2013 Membership Composition

Jabatan Position	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 14/DK/SK/ VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 Decision Letter of the Board of Commissioner No. 14/DK/SK/ VII/2012 dated July 26, 2012	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 18/DK/SK/ VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 Decision Letter of the Board of Commissioner No. 18/DK/SK/ VI/2013 dated June 20, 2013	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 22/DK/SK/ VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Decision Letter of the Board of Commissioner No. 22/DK/ SK/VIII/2013 dated August 20, 2013
Ketua Chairman	Laode M. Kamaluddin	Laode M. Kamaluddin	Laode M. Kamaluddin
Wakil Ketua Vice Chairman	Zaelani	Zaelani	Zaelani
Anggota Member	Ratna Wardhani	Ratna Wardhani	Ratna Wardhani
Anggota Member	Rukmana Nugraha Adhi	Rukmana Nugraha Adhi	Rukmana Nugraha Adhi
Anggota Member	Alida Basir Astarsis	Alida Basir Astarsis	Alida Basir Astarsis
Anggota Member	Ragil Kuncoro	-	Benjamin Hassan

Lampiran V Kepemilikan Saham Perusahaan

Daftar Pemegang Saham (Perusahaan Garuda Indonesia Tbk. Tahun 2015)

(dalam lembar saham, kecuali dinyatakan lain)
(In share amount, except stated otherwise)

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Saham (%) Share Percentage (%)	Status Status
Pemegang Saham Mayoritas (kepemilikan saham lebih dari 5%) <i>Majority Shareholders (share ownership more than 5%)</i>			
Negara Republik Indonesia	15.653.128.000	60,51	Pemerintah <i>Government</i>
Credit Suisse AG Singapore TR AC CL - PT Trans Airways	6.370.697.372	24,63	Perseroan Terbatas <i>Limited Liability Company</i>
Pemegang Saham Minoritas (kepemilikan saham kurang dari 5%) <i>Minority Shareholders (share ownership less than 5%)</i>			
Credit Suisse AG SG Trust A/C CL - Finegol	635.739.990	2,46	Badan Usaha Asing <i>Foreign Company</i>
Talent Center Limited	298.036.000	1,15	Badan Usaha Asing <i>Foreign Company</i>
BPJS Ketenagakerjaan JHT	295.088.500	1,14	Perseroan Terbatas <i>Limited Liability Company</i>
PT Mega Asset Management	244.725.900	0,95	Perseroan Terbatas <i>Limited Liability Company</i>
PT Gaya Hiup Masa Kini	94.239.700	0,36	Perseroan Terbatas <i>Limited Liability Company</i>
PT Barbizone Bau Resort	70.250.000	0,27	Perseroan Terbatas <i>Limited Liability Company</i>
Pratama Saham - 994244000	53.687.900	0,21	Reksadana <i>Mutual Fund</i>
Dana Pensiun Perkebunan	42.586.100	0,16	Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>
Citibank New York S/A The Emerging Market	38.516.149	0,15	Badan Usaha Asing <i>Foreign Company</i>
Credit Suisse AG Singapore TRUST A/C CLI	38.516.149	0,14	Badan Usaha Asing <i>Foreign Company</i>
Citibank New York S/S Dimensional Emergi	34.271.881	0,13	Badan Usaha Asing <i>Foreign Company</i>
Dana Pensiun Bank Mandiri Satu	29.258.000	0,11	Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>
PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya - CAR	25.569.500	0,10	Asuransi <i>Insurance</i>
Reksa Dana Pratama Syariah 886904000	21.487.000	0,08	Reksadana <i>Mutual Fund</i>
PT Indolife Pensiontama	19.952.702	0,08	Asuransi <i>Insurance</i>
Reksa Dana Sucoinvest Maxi Fund	17.386.100	0,07	Reksadana <i>Mutual Fund</i>
Dana Pensiun Semen Padang	17.268.500	0,07	Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>
PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya	17.138.500	0,07	Asuransi <i>Insurance</i>

Lampiran VI KAP yang Digunakan Perusahaan

KAP yang Memberikan Jasa Audit
(Perusahaan Garuda Indonesia Tbk. Tahun 2016)

